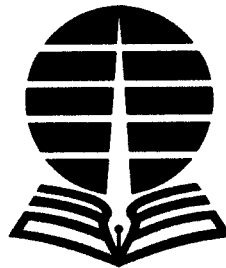


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN COREMAP II DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
KABUPATEN BUTON**



**TAPM di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**YULIA WIDIARTI
NIM. 014966297**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

P E R N Y A T A A N

TAPM yang berjudul Efektifitas Kebijakan Coremap II dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta,

2009

Yang Menyatakan,




JULIA WIDIARTI
NIM. 014966297

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN COREMAP II DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PESISIR KABUPATEN BUTON

NAMA : YULIA WIDIARTI

NIM : 014966297

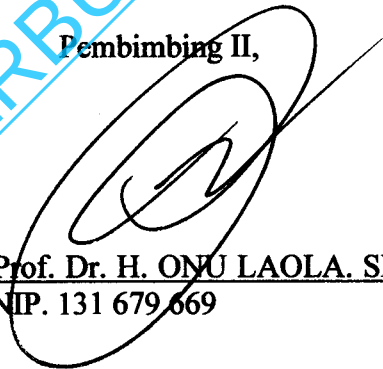
PROGRAM STUDI : MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I,



Dr. BAHTIAR
NIP.131 946 653

Pembimbing II,

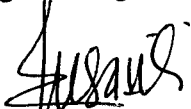


Prof. Dr. H. ONU LAOLA. SE.MS
NIP. 131 679 669

Mengetahui,

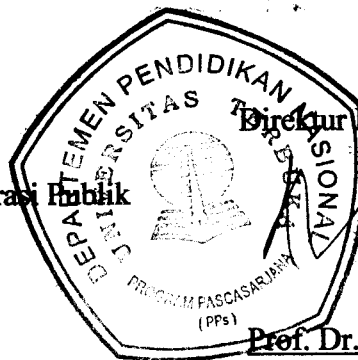
Ketua Bidang Ilmu/

Program Magister Administrasi Publik



Dra. SUSANTI, MSi
NIP. 131 052 021

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. UDIN S. WINATAPUTRA, MA
NIP. 130 367 151

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : YULIA WIDIARTI
NIM : 014966297
PROGRAM STUDI : MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
**JUDUL TAPM : EFEKTIFITAS KEBIJAKAN COREMAP II DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PESISIR KABUPATEN BUTON**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 24 November 2009

Waktu : 10.00 – 12.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. WAWAN RUSWANTO, M.Si

Penguji Ahli

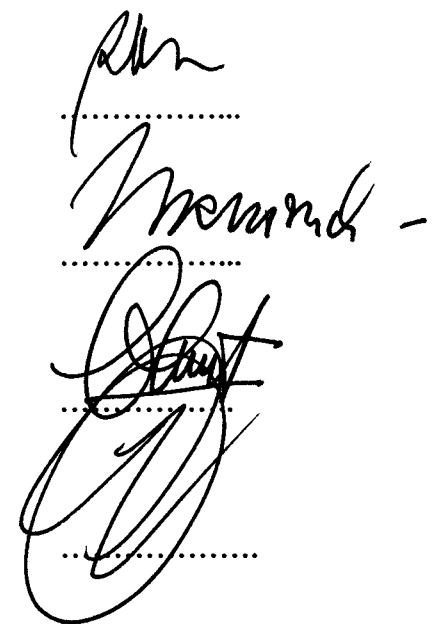
Nama : Prof. Dr. HM. ARIES DJAENURI, MA

Pembimbing I

Nama : Dr. BAHTIAR

Pembimbing II

Nama : Prof. Dr. H. ONU LAOLA, SE. MS



ABSTRAK

Efektifitas Kebijakan Coremap II dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton

Yulia Widiarti

Universitas Terbuka

yuliawidiarti@yahoo.co.id

Kata Kunci: Coremap II, Kesejahteraan, Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton

Penelitian ini berjudul Efektifitas Kebijakan Coremap II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Buton . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Coremap II Kabupaten Buton. dan mengetahui sejauh mana efektifitas kebijakan Coremap II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Buton.

Pemecahan masalah penelitian ini menggunakan teori Difusi Inovasi. Metode yang digunakan adalah metode survei. Populasinya adalah masyarakat pesisir yang merupakan wilayah binaan Coremap. Sampel penelitian ditetapkan melalui tehnik sampling proporsional, data hasil penelitian dianalisis melalui pendekatan tabel frekuensi dan persentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Coremap II Kabupaten Buton telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah melalui sosialisasi program, pelatihan pada masyarakat sasaran program, pembentukan kelompok usaha produktif diikuti dengan pemberian modal usaha, kampanye program melalui Radio lokal sehingga masyarakat sasaran program Coremap II dapat mengetahui secara pasti mengenai tujuan, fungsi serta sasaran program Coremap II pada masyarakat pesisir sebagai sasaran program. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi program Coremap II adalah efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, karena dengan adanya program Coremap II masyarakat pesisir sebagai sasaran program Coremap II telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi kelautan terutama mengenai sumber daya terumbu karang. Selain itu masyarakat juga telah mampu meningkatkan tingkat produktifitas dan pendapatannya sehingga masyarakat pesisir cenderung mulai meningkat kesejahteraannya. Dari Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Coremap II Kabupaten Buton telah terlaksana dengan baik dan cukup efektif dalam upaya Coremap dalam mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai sasaran program Coremap. Sebagai saran, perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu Coremap harus terus memberikan penguatan kepada masyarakat sebagai sasaran programnya sampai betul-betul bias mandiri secara

ekonomi, sehingga masyarakat bisa memiliki pendapatan yang memadai, sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan alam kelautan umumnya dan pelestarian terumbu karang khususnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

The Effectiveness of COREMAP II Policy in Escalating the Welfare of Coastal Community in the District of Buton

Yulia Widiarti

Universitas Terbuka (The Open University)

yuliawidiarti@yahoo.co.id

Key Words: Coremap II, Welfare, Coastal Community of Buton District

This research entitled “The Effectiveness of Coremap II Policy in Escalating the Welfare of Coastal Community in the District of Buton”. The objectives of the research are to identify policy implementation of Coremap II Programs in the District of Buton, and to solicit the significance of policy implementation of Coremap II programs in mounting the welfare of coastal community in the district.

Some theories used in answering the research questions are those of Innovative Diffusion theories. In addition, the method used in the research is survey method. The population of the research are those of coastal community within the program sites of Coremap II of Buton District. Moreover, sample of the research were determined through proportional sampling technique, and the data analysis was done through tabulation of frequency and percentage approaching system.

The result of the research reveals that the policy implementation of Coremap II in the District of Buton has been put into practice through various activities, including socialization of programs, training target audience, establishment of small productive entrepreneurship group in the community followed by the provision of seed fund (capital), campaigns of program through media, including local radio in order for the target audience to be acquainted with goals, functions and targets of the designed Coremap II programs, particularly for coastal community as the primary target audience of the Coremap II program. In addition, the research also shows that the implementation of Coremap II program is considered effective in leveraging the welfare of coastal community, since the community already have adequate knowledge and skill in the management of economic resources of coastal area, particularly those related to coral reef resources. Moreover, the coastal community have had the capacity to mount their productivity and income through which their wellbeing is likely to get better.

Based on the result of the research, it is concluded that Coremap II policy has been implemented successfully in the District of Buton, from which the policy is considered effective in leveraging the welfare of coastal community, who are the primary target group of the program. However, the government attention is still

considered necessary in maintaining the welfare of the community, particularly coastal community. In addition, it is also suggested that Coremap II officials should continually empower the coastal community as the primary target of the program in order they have adequate capacity to be economically independent by having better income. By doing so, the community are willing to actively participate in the conservation efforts of coastal environment and resources, particularly related to the conservation of coral reef.

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataallah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul Efektifitas Kebijakan Coremap II dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton.

Penelitian ini bermaksud untuk menemukan gambaran mengenai kebijakan Implementasi dan Efektifitas kebijakan *Coremap II* serta menganalisis secara mendalam dan sistematis usaha *Coremap* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tesis ini tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bahtiar, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Onu Laola SE., MS. Selaku Pembimbing I, yang dengan tulus ikhlas dan penuh perhatian dalam meluangkan segala waktu dan kesempatannya dalam memberikan bimbingan, masukan dan nasehat mulai dari proses penyusunan proposal penelitian sampai dengan penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Direktur Progam Pascasarjana Universitas Terbuka
3. Ibu Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik

4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana di Lingkungan Universitas Terbuka yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan.
5. Suami dan anak-anakku tercinta, yang dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan moral dan material selama penulis melakukan pendidikan sampai selesainya penulisan Tesis ini.
6. Tak lupa pula seluruh rekan-rekan mahasiswa UT atas kebersamaan dan kerjasamanya yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai selesainya tesis ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan baik moril maupun materil mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wataallah, Amin Ya Rabbal Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna.

Kendari, Februari 2010

Penulis

Yulia Widiarti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Abstraksi.....	iv
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Kebijakan Publik.....	8
2. Konsep Efektivitas	11
3. Implementasi Kebijakan.....	12
4. Visi Kesejahteraan	19
B. Kerangka Berpikir	24
C. Definisi Operasional	34
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi Penelitian	41
D. Sampel Penelitian	41
E. Instrumen Penelitian	42
E. Teknik Pengolahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Identitas Responden	48
2. Gambaran Implementasi Program Coremap II di Kabupaten Buton	52
C. Gambaran Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i> dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	79

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Sebaran lokasi penelitian berdasarkan wilayah kecamatan dan desa.....	41
Tabel 3.2 Penyebaran sampel penelitian pada setiap desa.....	42
Tabel 4.1 Usia Responden (dalam tahun)	48
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	50
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden	51
Tabel 4.4 Tanggapan Responden tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program <i>Coremap</i>	58
Tabel 4.5 Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan <i>Coremap</i> Yang berhubungan Pendidikan dan pelatihan	61
Tabel 4.6 Tanggapan Responden tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program <i>Coremap</i>	65
Tabel 4.7 Tanggapan Responden tentang Kebijakan <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Usaha Mensejahterakan Masyarakat	67
Tabel 4.8 Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Pembedayaan masyarakat	71
Tabel 4.9 Tanggapan Responden tentang Implementasi Program <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Kampanye Kesadaran Lingkungan	78
Tabel 4.10 Tanggapan Responden tentang Efektifitas <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Sosialisasi dan Pelatihan.....	84
Tabel 4.11 Tanggapan Responden tentang Efektifitas <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat	90
Tabel 4.12 Tanggapan Responden tentang Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i> dengan Sikap Masyarakat pada Lingkungan Pesisir.....	94
Tabel 4.13 Data kasus temuan penggunaan bahan peledak oleh para nelayan Tahun 2006-2008 di wilayah binaan <i>Coremap</i>	96
Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i>	

	Dalam meningkatkan taraf hidup nelayan	97
Tabel 4.15	Efektifitas Pelaksanaan Program Coremap yang berhubungan dengan Pendapatan Masyarakat	98
Tabel 4.16	Tanggapan Responden tentang Hasil Tangkapan Ikan Nelayan setelah adanya Pelaksanaan Kebijakan Coremap	101
Tabel 4.17	Perkembangan hasil tangkapan ikan oleh nelayan di wilayah binaan Coremap	102
Tabel 4.18	Tanggapan Responden tentang hasil tangkapan ikan setelah Menerapkan proses penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan Memelihara terumbu karang	103
Tabel 4.19	Tanggapan Responden tentang pengetahuan pengelolaan wilayah pesisir setelah adanya program Coremap	105
Tabel 4.20	Pengetahuan/keterampilan masyarakat binaan Coremap dalam Pengelolaan wilayah pesisir	106
Tabel 4.21	Tanggapan Responden tentang modal usaha masyarakat pesisir setelah adanya program Coremap.....	107
Tabel 4.22	Tanggapan Responden tentang tingkat pemenuhan kebutuhan sandang-pangan masyarakat setelah adanya program Coremap.....	108
Tabel 4.23	Tanggapan Responden tentang bagaimana Perbaikan perumahan penduduk setelah adanya program Coremap	111
Tabel 4.24	Tanggapan Responden tentang tingkat perbaikan pendidikan masyarakat pesisir setelah adanya program Coremap	113
Tabel 4.25	Tanggapan Responden tentang tingkat Kerja Sama masyarakat pesisir setelah adanya program Coremap.....	114
Tabel 4.26	Tanggapan Responden tentang keikutsertaan masyarakat pesisir setelah adanya program Coremap.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Usulan Kegiatan Block Grand Tahun 2007	122
Lampiran 2. Penyaluran dana Seed fun dan AIG di 14 kecamatan wilayah <i>Coremap</i>	124

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi terumbu karang di Indonesia telah mengalami degradasi yang mengkhawatirkan. Data yang di laporkan oleh WRI tahun 2002 bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia dalam 50 tahun terakhir adalah hanya 6,20 % dalam kondisi sangat baik, 23.2 % dalam kondisi baik, 28.30% dalam kondisi rusak dan 41,78 % dalam kondisi rusak berat. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerusakan terumbu karang meningkat dari 10% menjadi 50%.

Kerusakan terumbu karang di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu (1) faktor fisik, (2) biologis dan (3) aktifitas manusia. Faktor fisik umumnya lebih bersifat alami seperti perubahan suhu dan bencana alam. Faktor biologis disebabkan oleh ekosistem lainnya seperti mangrove dan lamun yang rusak dan faktor manusia adalah karena disebabkan oleh adanya aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan seperti: (1) penangkapan ikan dengan bahan peledak, (2) penangkapan dengan racun sianida dan (3) pengambilan karang dan pasir laut untuk kebutuhan bahan bangunan.

Penggunaan bahan peledak disekitar pesisir pantai Pulau Buton mulai dikenal oleh nelayan setempat sekitar tahun 1980 dan telah menjadi kebiasaan mereka dan akhir-akhir ini penggunaan bahan peledak semakin mengkhawatirkan, karena jumlah dan intensitasnya semakin meluas sehingga mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang semakin parah. Dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 1998 sampai tahun 2002

kasus temuan penggunaan bahan peledak oleh petugas patroli sebanyak 98 kasus dan ini belum sepenuhnya terungkap karena faktor keluasan wilayah pantai yang sukar diawasi secara bersamaan, sehingga hal ini tidak dapat dijangkau seluruhnya oleh petugas patroli, dan selain itu karena keterbatasan biaya operasional tenaga lapangan dan peralatan (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton: 2008).

Fenomena kerusakan terumbu karang telah menjadi masalah nasional, karena itu kondisi lingkungan alam kelautan Indonesia dewasa ini telah banyak mengalami kerusakan. Hal ini sebagai akibat dari cara penangkapan ikan oleh para nelayan yang tidak terkendali misalnya dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia beracun lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, namun disisi lain telah merusak biota laut yang tak terhingga nilainya bagi kelangsungan pembangunan nasional. Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia beracun dalam kegiatan melaut telah dimulai sejak lama dan sempat terhenti sekitar tahun 1973, namun karena pengawasan yang mengendor maka cara penangkapan dengan cara ini muncul kembali pada tahun 1993. Penggunaan bahan peledak oleh para nelayan semakin marak dan akhir-akhir ini semakin berkembang tidak terkendali (Yuni Ikawati, 2001:83).

Melihat masalah kerusakan lingkungan alam kelautan dan terumbu karang yang semakin terancam, pihak pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, *Coremap* (*Coral Reef Rehabilitation and Manajement Program*) atau program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, melakukan berbagai kampanye lewat media massa dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan seperti penyuluhan penyelamatan terumbu karang guna memberi pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat terutama

masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai agar mereka memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam usaha menjaga dan menyelamatkan kelestarian terumbu karang dari kerusakannya yang semakin parah sebagai akibat dari ulah para nelayan sendiri.

Kabupaten Buton adalah salah satu daerah yang secara geografis memiliki sumber daya alam kelautan yang sangat potensial karena wilayahnya dikelilingi oleh hamparan lautan yang luas, yang seharusnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Buton dan masyarakat pesisir pada khususnya, namun saat ini kondisi terumbu karangnya dan biota laut lainnya sudah cenderung mengalami kerusakan akibat dari perlakuan masyarakat pesisir yang kurang memperhatikan kelangsungan biota laut misalnya menggunakan cara-cara yang cenderung dapat merusak terumbu karang terutama cara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan kimia beracun dan bahan peledak.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang dan unsur-unsur biota laut lainnya dari praktek penangkapan ikan oleh para nelayan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang diikuti pula oleh lembaga-lembaga pemerhati lingkungan kelautan dan terumbu karang diantaranya lewat program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang "*Coremap*" (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung penyelamatan kelestarian terumbu karang dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelestarian terumbu karang.

Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) dalam rangka menyelamatkan terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah dan tidak terkendali maka usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat memanfaatkan lingkungan pesisir sebagai sumber penghidupan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kelautan. Hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat pesisir dapat tetap hidup dari lingkungan alam kelautan namun disisi lain kelestarian lingkungan alam kelautan tetap terpelihara sepanjang zaman.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton saat ini dalam upaya memberdayakan masyarakat yang bermukim disekitar pesisir pantai diantaranya adalah masalah ketersediaan sarana dan prasarana produksi masyarakat yang masih sangat terbatas, sarana pendidikan dan sarana keamanan. Sarana penangkapan nelayan rata-rata masih sederhana dan jenis mata pencaharian masyarakat masih sangat terbatas, sehingga pendapatan masyarakat Kabupaten Buton khususnya masyarakat pesisir masih sangat rendah sehingga masyarakatnya masih banyak yang tergolong miskin. Untuk menjawab kondisi tersebut diperlukan suatu penyusunan strategis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang agar potensi sumber daya alam terumbu karang tetap lestari (*sustainable*) dan pendapatan masyarakat dapat terus mengalami peningkatan.

Tantangan pemerintah daerah tersebut diantaranya adalah: (1) ingin mewujudkan visi program *Coremap II* di Kabupaten Buton yaitu tercapainya peningkatan penutupan karang meningkat 5% pertahun sampai tingkatan dicapai dan tetap dipertahankan agar sebanding dengan tingkatan untuk karang sejenis diwilayah

yang tertata baik atau wilayah yang sudah lama ada, dan pendapatan masyarakat meningkat 10% tiap tahun sebelum masa berakhirnya proyek, (2) ingin mewujudkan visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (3) pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesatuan bangsa. Selain tantangan tersebut di atas pemerintah daerah ingin memperbaiki masalah terumbu karang yang telah rusak diberbagai wilayah sebaran terumbu karang di Kabupaten Buton. Harapan pemerintah daerah memperbaiki kondisi biofisik terumbu karang adalah ingin mempertahankan keberlangsungan potensi sumberdaya alam terumbu karang yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Coramap-Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Program Rehabilitasi dan pengelolaan Terumbu Karang) adalah program pemerintah yang bertujuan melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan secara lestari terumbu karang Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program ini telah ditentukan enam langkah penting yaitu: (1) menyadarkan masyarakat untuk memahami arti penting terumbu karang dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatannya secara lestari, (2) meningkatkan kemampuan kelembagaan dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan implementasi kebijaksanaan yang mempengaruhi pengelolaan terumbu karang, (3) mengembangkan pengelolaan berbasis masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengguna terumbu karang, (4) membentuk sistem jaringan pemantauan dan informasi terumbu karang untuk

menyebarkan informasi dari hasil monitoring, (5) meneliti dan mengevaluasi status dari terumbu karang dan (6) penegakan hukum.

Implementasi program *Coramep II* di Kabupaten Buton sejak Mei 2005 telah memprogramkan kegiatan: (1) penguatan kelembagaan, (2) pemahaman terhadap masyarakat, (3) sosialisasi dan (4) kegiatan diskusi dan kampanye terhadap penyadaran masyarakat. Program ini mendapat dukungan masyarakat karena kondisi wilayah masyarakat lokal dalam melakukan upaya pengelolaan dan konservasi terumbu karang dan visi misi *Coremap II* tentang terumbu karang sehat dan ikan berlimpah sangat tepat karena mengandung arti yang cukup besar bagi penyelamatan terumbu karang dan kesejahteraan masyarakat. Program *Coramap II* secara umum bertujuan: (1) menjamin dan meningkatkan keswadayaan masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya ikan karang dan melestarikan habitatnya secara berkelanjutan, (2) sebagai kekayaan dan modal utama pembangunan desa pesisir, (3) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan (4) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan penelitian Efektifitas Kebijakan *Coremap II* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Buton

B. Perumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana gambaran efektifitas kebijakan *Coremap II* Kabupaten Buton dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kebijakan *Coremap II* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Buton.

C. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi berbagai pihak dan membantu dalam pengambilan keputusan *Coremap II* yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial dan politik secara umum serta program studi administrasi pembangunan khususnya.
2. Sebagai bahan masukan untuk peneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama ataupun yang ada kaitannya dengan efektifitas kebijakan publik.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Buton dan pihak penyelenggara program dalam hal ini pihak *Coremap II* yang didukung oleh *World Bank* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Buton.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Permasalahan penelitian ini didekati dengan menggunakan beberapa kajian teori dan konsep tentang kebijakan publik, efektifitas, dan implementasi Program *Coremap II* di Kabupaten Buton. Pendekatan kajian teori dan konsep yang digunakan, diharapkan dapat memecahkan permasalahan fenomena lingkungan alam kelautan dan terumbu karang serta efektifitas implementasi Program *Coremap II* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Konsep kebijakan publik

Lahirnya kebijakan publik karena didasari oleh adanya gejala sosial atau alam yang cenderung akan terjadi sesuatu yang dapat mengancam dan merugikan kepentingan umum. Lahirnya suatu kebijakan akan mendapatkan reaksi dari berbagai pihak sesuai dengan konsep diri orang yang memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan tertentu. Terdapat banyak perbedaan pandangan diantara para ahli mengenai pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy (dalam Kismartini, 2005) diantaranya seperti pandangan ilmuwan politik Horald D.Lasswell dan Abraham Kalan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Pengertian yang dikemukakan oleh Lasswell tersebut dipertegas pula oleh pandangan Carl J. Fredrick yang mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Rangkuman teori dan konsep tersebut pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang substantiasial sebagaimana seperti halnya dikemukakan oleh Amara Raksatya yang mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik pada prinsipnya memuat tiga elemen penting adalah sebagai berikut: (1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, (2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan (3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Untuk mempertegas pengertian kebijakan publik seperti yang telah dikemukakan di atas maka seorang pakar kebijakan publik Irfan Islamy memberikan contoh keanekaragaman pengertian kata publik dalam rangkaian kata sebagai berikut: (1) *public opinion* diterjemahkan dengan pendapat umum, kata publik mengandung pengertian umum, (2) *public library* diterjemahkan perpustakaan rakyat dan (3) *public health* diterjemahkan sebagai kesehatan masyarakat. Kata publik secara umum dapat diartikan sebagai masyarakat atau rakyat.

Setelah memahami pengertian kebijakan atau pengertian publik maka akan lebih mudah memahami pengertian kebijakan publik. Thomas R Dye (1991) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai “ *whatever Governments choose to do or not to do* ” (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu). Lebih lanjut dia memberikan batasan tentang kebijakan publik dalam pengertian bahwa kebijakan publik tidak saja apa-apa yang menjadi pilihan pemerintah, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketetapan dari pejabat tertinggi seperti presiden atau menteri sebagai pembantu presiden, akan tetapi sikap diamnya dari pemerintah juga termasuk kebijakan publik, artinya tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap sesuatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.

Sementara itu David Eastone (dalam Kismartini, 2005) menekankan bahwa kebijakan publik itu adalah kewenangan dari pemerintah, jadi hanya pemerintahlah yang berhak mengeluarkan semacam peraturan dan perundangan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hampir sama dengan Dye bahwa Eastone menjelaskan kebijakan publik itu apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tujuan kebijakan publik tersebut untuk menjawab atau merumuskan serta memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang muncul dari tuntutan masyarakat dalam bentuk alokasi nilai yang sifatnya otoritas dari pemerintah untuk diterapkan kepada masyarakat.

Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1990:13) memberikan sepuluh definisi tentang kebijaksanaan (1) *policy as a label for a field of activity* (Kebijaksanaan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu); (2) *policy as an expression of general purpose or desired state of affairs* (kebijaksanaan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki); (3) *policy as specific proposals*; (4) *policy decision of government*; (5) *policy as formal authorization*; (6) *policy as a program*; (7) *policy as output*; (8) *policy as outcome*; (9) *policy as*

theory or model dan (10) policyas process. Dari sekian definisi yang dikemukakan Solichin tersebut yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah pengertian atau definisi mengenai kebijaksanaan sebagai keputusan pemerintah dan kebijaksanaan sebagai program. Jika digunakan untuk memecahkan fenomena program *Coramep II* yang dirancang dalam satu bentuk program, maka pada umumnya yang dimaksudkan adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan. Oieh karena itu jika berbicara mengenai program *coramep II* maka hal itu akan mencakup tindakan pengesahan, penyediaan berbagai sumber-sumber penunjang program (dana dan tenaga staf) untuk melaksanakan dan menyelesaikan program tersebut.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

2. Konsep efektifitas

Purwanto (2006) menyebutkan ada empat faktor utama yang mempengaruhi efektifitas yaitu struktur, strategi, teknologi dan lingkungan. Keempat faktor tersebut saling mengkait dan mempengaruhi efektifitas organisasi. Menurut pendekatan *kontingensi* komponen penentu organisasi adalah lingkungan. Keadaan lingkungan

akan mempengaruhi para manajer dalam menyusun strategi organisasi. Strategi organisasi menentukan pilihan desain struktur dan teknologi organisasi yang dipilihnya. Disamping itu teknologi organisasi juga akan mempengaruhi pilihan desain struktur dan kultur organisasi.

Menurut Gibson dkk (1985) efektifitas adalah penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin lebih efektif kita menilai mereka. Efektifitas diukur dari tiga tingkatan analisis organisasi yaitu:

(1) Efektifitas individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi dan stress, (2) efektifitas kelompok yang dipengaruhi oleh kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peranan dan norma. (3) efektifitas pada level organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategis, struktur, proses dan budaya.

Ada tiga pendekatan untuk mengukur efektifitas suatu organisasi yaitu:

(1) Pendekatan pencapaian tujuan mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Jika organisasi mampu mencapai tujuan maka organisasi tersebut efektif, (2) pendekatan sistem mengukur bagaimana organisasi memperoleh input dan berproses, namun tanpa menaruh perhatian yang cukup terhadap pencapaian tujuan dan (3) pendekatan konstituensi strategis memandang jika konstituens puas terhadap kinerja organisasi maka organisasi tersebut adalah efektif.

Jones dalam Purwanto (2006) menyatakan perfektif berbeda dalam mengukur efektifitas yaitu pendekatan sumber eksternal, pendekatan sistem internal dan pendekatan teknis

3. Konsep implementasi kebijakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya, karena sebaik apapun rumusan kebijakan, akan tetapi tidak dapat diimplementasikan maka tidak ada artinya

suatu kebijakan tersebut dirumuskan. Menurut Anderson dalam Sunggondo dan Bambang (1994:8), implementasi adalah upaya mewujudkan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan. Implementasi sering menunjuk keseluruhan proses tujuan dan merujuk pada hasil suatu rencana yang nyata. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2006: 146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif.

Ilmuwan politik yang tertarik mengkaji kebijakan publik semakin meningkat, namun masih relatif sedikit yang diketahui orang mengenai proses implementasi kebijakan. Keadaan ini akan berdampak negatif dalam dua hal. *Pertama*, hal ini tentu saja merupakan kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami

proses kebijakan. *Kedua*, kondisi ini akan lebih mendorong terjadinya kesempatan/peluang yang memberi saran yang kurang baik pada para pembentuk kebijakan.

Ada beberapa alasan mengapa studi mengenai implementasi kebijakan sering diabaikan oleh ilmuwan politik. *Pertama*, pengabaian studi implementasi kebijakan sebagian disebabkan oleh asumsi yang naif yang tersirat dalam banyak studi kebijakan. Mereka mempunyai asumsi bahwa sekali kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, maka kebijakan itu akan diimplementasikan dan hasil-hasil yang diinginkan akan mendekati hasil-hasil yang diharapkan oleh para pembentuk kebijakan. Proses implementasi dianggap merupakan serangkaian keputusan-keputusan dan interaksi-interaksi biasa yang tidak layak mendapatkan perhatian dari para sarjana yang mencari substansi politik. Implementasi seakan-akan merupakan hal yang sederhana dan nampak tidak mencakup isu-isu besar. *Kedua*, pada tahun 1960-an di Amerika Serikat pertumbuhan Sistem Anggaran Belanja, Penyusunan Program dan Perencanaan merupakan teknik analitik utama di dalam mengkaji kebijakan. Hal ini telah mendorong para analis kebijakan untuk mengabaikan masalah-masalah implementasi kebijakan. Sistem tersebut mengonsentrasikan perhatian para pembuat keputusan pada pilihan-pilihan antara metode-metode yang berbeda dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dipilih. Mereka memusatkan perhatian terutama pada keputusan-keputusan dan sasaran-sasaran yang dipilih. Mereka memusatkan perhatian terutama pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan di Washington DC dengan mengesampingkan eselon-eselon bawahan dari badan-badan yang bertanggungjawab bagi implementasi.

Perhatian mereka dalam memperbaiki landasan bagi pembentuk kebijakan tidak ditujukan kepada masalah-masalah dalam memberikan pelayanan kebijakan, tetapi lebih menekankan sasaran program-program dan sarana-sarana alternatif dalam mencapai sasaran itu. *Ketiga*, beberapa kesulitan seringkali ditemui dalam usaha mengkaji secara terinci proses implementasi kebijakan.

Masalah-masalah implementasi adalah sangat kompleks dan para sarjana seringkali dihambat oleh pertimbangan-pertimbangan metodologi. Di samping itu, untuk melengkapi studi implementasi membutuhkan banyak variabel dan sangat sulit untuk mengukurnya. Akhirnya, suatu analisis implementasi yang komprehensif memerlukan perhatian yang besar terhadap banyak tindakan dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini akan berakibat pada kebutuhan alokasi waktu yang lama dan sumber-sumber yang besar untuk melakukan studi implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn, menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik, yakni: *Pertama*, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. *Kedua*, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non-realisis tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya, bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Empat faktor tambahan lain yang tercakup dalam model proses implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

pelaksanaan, karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi implementasi; dan kecenderungan (*disposition*) para pelaksana (*implementors*).

Edwards dalam Winarno (2008: 174) menyatakan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yakni: Prakondisi-parkondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selain masalah komunikasi yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai sumber-sumber penunjang lain.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak

efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna pelayanan-pelayanan publik.

Selain dua hal tersebut yang harus dicermati adalah masalah kecenderungan-kecenderungan apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Edwards, banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan yaitu kebijakan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Para pejabat birokrasi pemerintah merupakan pelaksana-pelaksana yang paling umum dan penting dalam mengetahui pengaruh tertentu pada kecenderungan-kecenderungan atau perilaku-perilaku mereka, bila dibandingkan dengan para hakim dan pelaksana kebijakan swasta/non pemerintah. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh badan-badan swasta lainnya. *Pertama*, badan-badan birokrasi pemerintah lebih bersifat homogen. Perilaku yang homogen ini berkembang karena model rekrutmen staf baru yang berlangsung secara selektif. *Kedua*, aspek lain yang merupakan sifat badan pemerintah adalah berkembangnya pandangan-pandangan parokial. Selain rekrutmen personil-personil yang mempunyai kesamaan pikiran, aspek-aspek lain

dari kehidupan organisasi membantu perkembangan pandangan-pandangan parokial di kalangan birokrat.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008: 202), berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yakni : *Pertama*, birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefenisikan sebagai urusan publik. *Kedua*, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap. *Ketiga*, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. *Keempat*, fungsi birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi. *Keenam*, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya. Otonomi yang mereka miliki membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar guna meraih pembagian yang dapat diukur dari pilihan-pilihan yang mereka ambil.

4. Visi kesejahteraan masyarakat

Sebuah visi pada dasarnya berhubungan erat dengan cita-cita masyarakat, yaitu tentang hal-hal yang akan dicapai di masa depan. Visi masyarakat terdiri atas sejumlah tujuan dari sebuah cita-cita masyarakat yang ingin dicapai. Akan tetapi cita-cita yang terdapat dalam sebuah visi tidak akan pernah benar-benar dapat direalisasikan secara menyeluruh dan sempurna. Namun demikian, visi dapat terus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berjuang mewujudkan cita-cita mereka dengan keyakinan penuh bahwa masa depan yang cerah akan dapat diraih. Merza Gamal (dalam, <http://mail.yahoo.com>: 2006) melakukan *research* dengan beberapa anggota masyarakat sebagai responden yang terdiri dari pedagang tingkat UKM, pegawai kantor, mahasiswa, wartawan, pendidik, pengusaha, ibu rumah tangga, supir, satpam, dan ulama, diketahui bahwa visi yang diinginkan oleh masyarakat sebagai bagian dalam sebuah pembangunan ternyata satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan latar belakang mereka, namun masih tetap ada sebuah kesamaan dimensi yang dimiliki oleh semuanya, yakni tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun di dalam masyarakat.

Merza Gamal (dalam, <http://mail.yahoo.com>: 2006) apabila di cari dalam literatur ekonomi, ternyata terminologi kesejahteraan memiliki banyak pengertian. Definisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materialistis murni yang menafikan keterkaitan rohaniah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa

kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek rohaniah.

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohanian, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakikat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua visi tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Konsep kesejahteraan menurut Idris batin Merza Gamal (dalam, <http://mail.yahoo.com>: 2006) dapat dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, *full employment* (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat, tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-

janda, penanggungan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta pertikaian menyangkut SARA (aturan atau ketentuan adat yang ada dimasyarakat yang telah berjalan secara turun temurun). Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah.

Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan ekonomi masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya aspek materi dan ruhaniah bagi kesejahteraan tidak independent satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat berhubungan erat.

Tingkat keharmonisan keluarga yang tinggi akan meningkatkan produktivitas individu dalam pembangunan ekonomi dan dunia usaha, sedangkan keharmonisan kehidupan sosial akan membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi pemerintahan daerah yang lebih efektif serta meningkatkan pembangunan di segala bidang. Untuk mencapai konsep kesejahteraan tersebut, setiap orang baik sebagai anggota masyarakat atau dunia usaha, maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintahan diharuskan mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi kemaslahatan sosial di lingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hidup bermasyarakat, atau di dalam bidang pemerintahan. Selama maksimalisasi kekayaan dan konsumsi adalah satu-satunya tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya.

Pemenuhan kepentingan pribadi adalah sebaik-baik kebijaksanaan, namun sebagai konsekuensinya sistem kekeluargaan akan hancur, kualitas generasi mendatang akan menurun, atau bahkan akan berakibat fatal pada kinerja dunia usaha dan pemerintahan itu sendiri. Sebuah kenyataan membuktikan bahwa kemajuan hidup secara materi tidak menjamin tingginya tingkat kebahagiaan dan keharmonisan sosial. Berdasarkan penelitian Richard Easterlin (Merza Gamal (<http://mail.yahoo.com>: 2006) yang dilakukan dalam 30 *survey* di 19 negara maju dan berkembang, disimpulkan bahwa negara-negara kaya tidak lantas lebih bahagia dari negara-negara miskin. Dengan demikian, ada hal lain, selain materi, yang dibutuhkan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan serta menghilangkan ketegangan dan *anomie* dalam mencapai suatu kesejahteraan.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial telah lama dikenal Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, misalnya merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

" Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila".

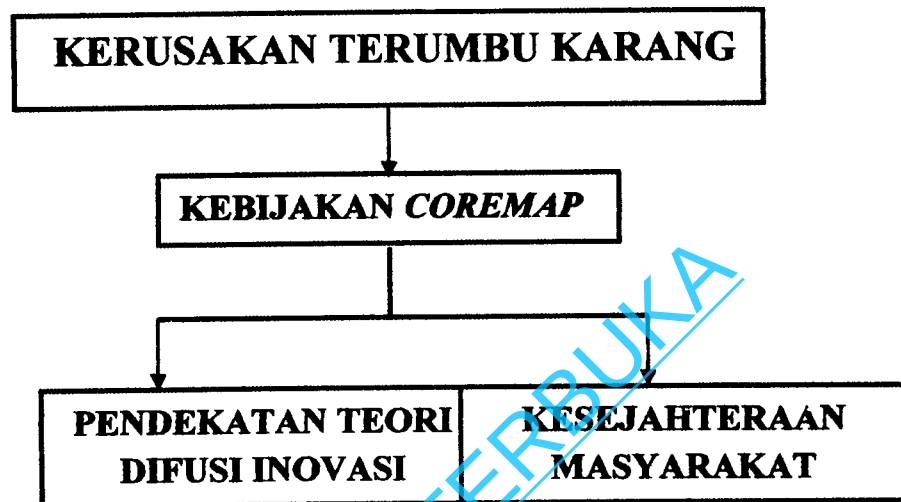
Menurut Suharto (2005), kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatfrom* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relative berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu ;

1. Kondisi kehidupan dan keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktifitas, yakni suatu kegiatan kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

B. Kerangka Berpikir

Bagan Kerangka Pikir Penelitian



Permasalahan penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan pendekatan teori Difusi Inovasi. Difusi adalah proses dimana inovasi tersebar ke dalam suatu sistem sosial. Dalam proses penyebaran inovasi diperlukan saluran komunikasi untuk menyebarkan ide-ide dan gagasan baru untuk suatu perubahan sosial pada suatu sistem sosial dan masyarakat. Proses difusi adalah suatu proses keputusan untuk menerima dan menolak suatu gagasan atau ide-ide tentang pembangunan.

Model pendekatan teori difusi inovasi banyak digunakan sebagai pendekatan perubahan sosial dan dalam kajian komunikasi pembangunan terutama digunakan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Teori difusi inovasi seperti yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers dalam (Effendi 2000:283) yang menulis buku tentang *"Diffusion of Innovations and Communications Technology, The New Media*

in Society” mengemukakan mengenai pengertian difusi, unsur-unsur difusi, ciri-ciri inovasi langkah-langkah dalam proses inovasi keputusan inovasi dan sebagainya.

Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*). Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan/ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi dan saling pertukaran informasi tersebut untuk mencapai pengertian bersama. Di dalam isi pesan itu terdapat ide baru (*newness*) yang memberikan kepada difusi ciri khusus yang menyangkut ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian adalah suatu derajat dimana sejumlah alternatif dirasakannya berkaitan dengan suatu peristiwa beserta kemungkinan-kemungkinan pada alternatif tersebut. Derajat ketidakpastian oleh seseorang dapat dikurangi dengan jalan memperoleh informasi.

Menurut Rogers yang termasuk dalam unsur-unsur utama dari difusi adalah: (1) inovasi, (2) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu (dalam jangka waktu tertentu dan (3) diantara para suatu anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide, karya, gagasan, atau obyek yang dianggap baru oleh seseorang. Selanjutnya Rogers mengemukakan ciri-ciri dari inovasi yang dirasakan oleh suatu anggota sistem sosial menentukan tingkatan adopsi. Lima ciri inovasi menurut Rogers adalah sebagai berikut: (1) *relative advantage* atau keuntungan relatif, (2) *Compatibility* atau

kesesuaian, (3) *Complexity* atau kerumitan, (4) *trialability* atau kemungkinan dicoba dan (5) *observability* atau kemungkinan diamati.

Relative advantage adalah suatu derajat dimana inovasi dirasakan lebih baik dari pada ide dan gagasan-gagasan lain yang menggantikannya. Derajat keuntungan relatif tersebut dapat diukur secara ekonomis, tetapi faktor prestasi sosial, kenyamanan dan kepuasan juga adalah merupakan unsur penting. *Compatibility* adalah suatu derajat dimana inovasi dirasakan ajeg atau konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman dan kebutuhan mereka yang melakukan adopsi. *Complexity* adalah suatu derajat dengan mana inovasi dirasakan sukar untuk dimengerti dan dipergunakan. *Trialability* adalah suatu derajat dengan mana inovasi dieksperimentasikan oleh orang lain. *Observability* adalah suatu derajat dengan mana inovasi dapat disaksikan oleh orang lain.

Mengenai saluran komunikasi sebagai sarana untuk menyebarkan inovasi, Rogers menyatakan bahwa media massa lebih efektif untuk menciptakan pengetahuan tentang inovasi, sedangkan saluran antar pribadi lebih efektif dalam pembentukan dan percobaan sikap terhadap ide-ide baru dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan adopsi atau menolak ide baru. Aspek lain dalam kegiatan difusi adalah apa yang dalam komunikasi dikenal sebagai *heterofili* dan *homofili*.

Mengenai waktu sebagai salah satu unsur utama dari difusi ide baru itu meliputi tiga hal, yakni sebagai berikut: (1) *innovations decision process* (proses inovasi keputusan), (2) *innovativeness* (keinovatifan) dan (3) *innovation's rate of adoption* (tingkat inovasi dari adopsi). *Innovations decision process* adalah proses mental dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi

ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke keputusan menerima atau menolak pelaksanaan ide baru, dan ke peneguhan keputusan itu. Mengenai *innovations decision process* adalah proses mental di mana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke keputusan menerima atau menolak pelaksanaan ide baru, dan peneguhan keputusan itu.

Terdapat lima langkah yang dikonseptualisasikan dalam proses ini, yakni: (1) *knowledge*, (2) *persuasion*, (3) *decision*, (4) *implementation* dan (5) *confirmation*. Proses inovasi keputusan ini seseorang mencari informasi dalam beberapa langkah untuk mengurangi ketidakpastian mengenai inovasi. Pada langkah pengetahuan seseorang menerima informasi yang melekat pada inovasi teknologis; dia ingin mengetahui inovasi apa itu dan bagaimana kerjanya. Tetapi pada langkah persuasi dan keputusan, seseorang mencari informasi tentang penilaian inovasi untuk mengurangi ketidakpastian mengenai konsekuensi yang diharapkan dari inovasi itu. Langkah keputusan membawanya ke penerimaan (adopsi), keputusan untuk memanfaatkan inovasi itu sepenuhnya, atau kepenolakan, keputusan untuk menolak inovasi itu.

Innovativeness adalah derajat dimana seseorang relatif lebih dini dalam mengadopsi ide-ide baru ketimbang anggota-anggota lain dalam suatu sistem sosial. Pengadopsi tersebut dikategorikan sebagai berikut: (1) *innovators*, (2) *early adopter*, (3) *early majority*, (4) *late majority* dan (5) *laggard*. *Rate of adoption* adalah kecepatan relatif dimana suatu inovasi diadopsi oleh anggota-anggota suatu system sosial. *Rate of adoption* atau tingkat adopsi biasanya diukur dengan waktu yang

diperlukan untuk persentase tertentu dari para anggota sistem untuk mengadopsi suatu inovasi.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Yang juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Dan adanya PERDA Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang

lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Dewasa ini, pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management*).

Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam hal-hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam praktek-praktek pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga kondisi fisik dan alamiah dari lingkungan pesisir dan laut, proses pengelolaannya diharapkan dapat menjadi lebih padu, lancar dan efektif serta diterima oleh masyarakat setempat.

Pernahkah kita berpikir bahwa kitalah orang yang sangat tergantung pada kondisi alam di sekitar kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kita sangat

membutuhkan air yang notabene sangat tergantung pada keadaan hutan di sekitar kita ? Lalu bagaimana keadaan hutan di sekitar, pernahkah kita berpikir bahwa hutan tersebut adalah milik kita, sehingga harus kita kelola agar terjaga kelestariannya ? Pernahkah kita dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan lingkungan di sekitar kita.

Proses pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan disamping kesamaan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Segenap gambaran wacana tersebut di atas secara umum memberikan cermin bagaimana sebuah pengelolaan yang melibatkan unsur masyarakat cukup penting untuk dikaji dan diujicobakan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ini lebih dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) atau *community based management (CBM)*.

Menurut Carter (1996) [*Community-Based Resource Management (CBRM)*] didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya

dan lingkungan secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya dan lingkungan yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Definisi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (*Coremap-Lipi*, 1997) adalah sistem pengelolaan sumber daya (terumbu karang) terpadu yang perumusan dan perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan Nikijuluw (2002) mendefinisikan PBM sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya (dalam bukunya Nikijuluw lebih menitikberatkan pada pengelolaan perikanan) sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Lebih lanjut Nikijuluw (2002) mengemukakan bahwa PBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat (PBM/CBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam

proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Lebih lanjut Carter (1996) mengemukakan bahwa konsep pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif yaitu; (1) mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis; (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen; serta (7) masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan. Perkembangan konsep pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) mengalami perubahan dengan dikembangkannya satu konsep yang disebut "*Co-Management*". Dalam konsep "*Co-Management*" ini pengelolaan lingkungan pesisir dan laut tidak hanya melibatkan unsur masyarakat lokal saja tapi juga melibatkan unsur pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya tumpang tindih kepentingan pemanfaatan di wilayah pesisir dan lautan.

Perlu ditegaskan bahwa dalam konsep *Co-Management*, masyarakat lokal merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang masih murni oleh masyarakat (CBM) menjadi embrio dari penerapan konsep *Co-Management* tersebut. Bahkan secara lebih tegas Gawell (1984) dalam *White et al*

(1994) menyatakan bahwa tidak ada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berhasil (dalam studi Gawell adalah ekosistem terumbu karang) tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai pengguna (*the users*) dari sumberdaya alam dan lingkungan tersebut.

Selanjutnya Pomeroy and Williams (1994) menyatakan bahwa penerapan *Co-Management* akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik lokasi, maka *Co-management* hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Tetapi lebih dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai untuk situasi dan lokasi tertentu. Penerapan *Co-management* yang baik dan sukses memerlukan waktu, biaya dan upaya bertahun-tahun. Pomeroy dan Williams (1994) mengemukakan sembilan kunci kesuksesan dari model *Co-Management*, yaitu (i) batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi, (ii) kejelasan keanggotaan, (iii) keterikatan dalam kelompok, (iv) manfaat harus lebih besar dari biaya, (v) pengelolaan yang sederhana, (vi) legalisasi dari pengelolaan, (vii) kerjasama dan kepemimpinan dalam masyarakat, (viii) desentralisasi dan pendelegasian wewenang, serta (ix) koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.

C. Definisi Operasional

Usaha untuk mengefektifkan implementasi kebijakan Coremap di Kabupaten Buton adalah dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan sosialisasi program kepada seluruh sasaran program yakni masyarakat pesisir dengan cara memberikan pelatihan, diskusi kelompok dan melibatkan masyarakat dalam melakukan sosialisasi kebijakannya. Dengan melibatkan atau memberdayakan masyarakat lokal sosialisasi kebijakan Coremap dapat mencapai sasaran programnya yakni dapat mengubah pola pikir masyarakat dari tidak memahami arti penting kelestarian terumbu karang menjadi mengetahui dan memahami arti penting menjaga kelestarian terumbu karang. Dengan melakukan pola tersebut pihak Coremap diharapkan tidak akan mengalami hambatan yang cukup berarti dalam mengimplementasikan programnya. Efektifitas kebijakan Coremap di Kabupaten Buton ditunjang pula oleh adanya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang setelah adanya proses sosialisasi program Coremap. Selain itu diikuti pula oleh adanya pemberian bantuan modal usaha kepada warga masyarakat sasaran program Coremap sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi wilayah pesisir secara ekonomis.

Coremap tahap II dilaksanakan melalui tiga komponen, yaitu: (1) penguatan Kelembagaan, (2) berbasis pada masyarakat & pengelolaan bersama dan (3) kepedulian masyarakat, pendidikan dan mitra bahari. Untuk itu tujuan dijelaskan kedalam tiap komponen yang ada.

Tujuan komponen penguatan kelembagaan adalah meningkatkan daya tanggap lembaga pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat pantai, untuk mendukung Pengelolaan Bersama Cagar Laut dan Kawasan Laut Terlindung lain. Tujuan Komponen Pengelolaan Bersama dan Berbasis Masyarakat adalah memberdayakan semua masyarakat pantai dan lembaga di seluruh Kabupaten Program secara berkesinambungan mengelola bersama terumbu karang dan ekosistemnya untuk meningkatkan pendapatan, yang akan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Komponen Kepedulian Masyarakat, Pendidikan dan Mitra Bahari adalah meningkatkan kepedulian masyarakat akan manfaat konservasi ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan yang berkelanjutan yang menuju ke perubahan sikap. Disamping itu juga pada komponen ini dapat menanggulangi kekurangan pengetahuan di Indonesia mengenai manfaat pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan dan selanjutnya mendukung terwujudnya perubahan sikap. Penjelasan ruang lingkup dipisahkan kedalam tiap komponen, karena masing-masing komponen memiliki spesifikasi ruang lingkup yang berbeda.

Ruang lingkup Komponen Penguatan Kelembagaan adalah menyediakan Tenaga Ahli, Human Resources Development dan masukan hukum untuk mendukung perubahan paradigma dari pengelolaan terpusat kepada daerah untuk terumbu karang dan ekosistemnya yang disahkan oleh UU Nasional UU Pasal 32/04 dan pasal 33/04. Hal ini memperkuat *co-management* (Pengelolaan Bersama) terumbu karang dan ekosistemnya yang didesentralisasi.

Ruang lingkup komponen pengelolaan bersama dan berbasis pada masyarakat adalah memberdayakan masyarakat pantai kabupaten Buton terutama dalam kawasan

Coremap untuk mengelola secara intensif dan beraneka ragam ekosistem terumbu karang dengan biaya yang efektif dan dengan cara yang berkelanjutan. Khususnya, orang muda dan mampu dalam masyarakat, sebagai fasilitator dan dalam pemerintah akan diberdayakan menggerakkan perubahan sikap masyarakat.

Ruang lingkup komponen Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan Kemitraan di Laut adalah upaya pemberdayaan anak-anak dan kaum muda melalui pendidikan dan program beasiswa yang akan membantu menghapus sikap merusak terumbu karang, memberdayakan stakeholder melalui penyuluhan, memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat melalui bantuan teknis dan kampanye kepedulian. Komponen Penguatan Kelembagaan mempunyai output sebagai berikut:

(1) Koordinasi program, M&E dan training: a) Dukungan untuk National Coordination Unit (NCU), b) dukungan untuk pengawasan nasional, evaluasi, dan umpan balik kegiatan program, c) dukungan untuk koordinasi training dan workshop dan training tingkat nasional selama tiga tahun pertama tahap II dan d) training untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan PMU dan koordinasi antara NCU dan PMU. (2) Riset dan pengawasan terumbu karang CRITC: a) Dukungan CRITC nasional, b) pengawasan presentase penutupan terumbu karang di tingkat kabupaten sampai desa, c) pengawasan perikanan kabupaten, d) data sosial-ekonomi dikumpulkan, dianalisis dan disebarluaskan, e) dukungan untuk riset daerah, f) pinjaman modal usaha dan g) dukungan pendidikan terumbu karang. (3) Hukum, kebijakan dan bantuan strategi: a) Dukungan untuk mensyahkan struktur program, b) bantuan teknis bagi NCU untuk bantuan kebijakan nasional, c) bantuan teknis penyusunan dan pelaksanaan peraturan (perdes), bantuan teknis bagi masyarakat dalam pembentukan daerah perlindungan laut (DPL), d) peningkatan dan penyebar luasan strategi pengelolaan terumbu karang nasional yang dikembangkan melalui tahap I, e) pengembangan dan penyebar luasan strategi pengelolaan terumbu karang regional dan strategi pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan dan f) dukungan untuk kebijakan perdagangan ikan hidup terumbu karang, strategi dan program yang diusulkan.

Komponen Pengelolaan Bersama dan Berbasis Masyarakat mempunyai output sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat: a) training pengelolaan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, b) lembaga pengelolaan terumbu karang tingkat desa, c) wisata studi masyarakat dan saling tukar kunjungan, d) fasilitas desa dan bantuan teknis, (5) pembentukan pusat informasi terumbu karang desa dengan pembuatan pondok informasi tingkat desa dan e) jaringan komunikasi seperti radio CB (Kabupaten Buton dipusatkan di Kecamatan Batauga)
2. Pengelolaan terumbu karang berbasis komunitas: a) penelusuran dan pemetaan sumber daya desa secara partisipatif, b) persiapan rencana pengelolaan terumbu karang desa yang didukung secara ilmiah dan rencana antar desa yang disahkan dengan perdes, c) pembentukan kawasan lindung desa guna mendukung rencana pengelolaan terumbu karang kabupaten yang berkelanjutan, d) inventarisasi nelayan, kendaraan, peralatan dan fasilitas kerja dan pengembangan manajemen perikanan, f) contoh penyitaan peralatan penangkapan ikan yang merusak di desa yang dipilih, g) pengawasan masyarakat yang terus berlangsung atas terumbu karang dan ekosistemnya, h) pengawasan bersama dan penegakan hukum dan i) memperkuat dan memperluas kawasan pengelolaan yang berbasis pada masyarakat.
3. Pengembangan masyarakat: a) membina dan mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan desa untuk mengelola dana masyarakat, b) bantuan teknis bagi pembentukan cabang di desa yang berpartisipasi, c) fasilitas kredit simpan pinjam bagi setiap desa peserta untuk biaya hidup dan kegiatan mata pencaharian, d) bantuan teknis untuk meninjau ulang, merubah dan melaksanakan kegiatan mencari nafkah yang diusulkan, e) dana khusus untuk perbaikan desa, f) penyediaan kesempatan penghasilan di tempat selain desa program dan g) dana khusus di kabupaten untuk mendukung usaha kecil dan menengah.
4. Pengelolaan kawasan konservasi laut kabupaten: a) mendukung pembentukan dan pembinaan badan pemberdayaan masyarakat pesisir di kabupaten, b) membantu PMU daerah untuk mendukung co-management (pengelolaan bersama), c) mengembangkan rencana strategis sumber daya laut kabupaten dan membentuk jaringan daerah perlindungan laut dan d) membina manajemen berkelanjutan perdagangan spesies terumbu karang yang hidup dan bersertifikat.
5. Dukungan bagi taman laut: a) Memperkuat kapasitas PHKA mendukung co-management (pengelolaan bersama) kawasan perlindungan laut, b) studi banding antara pengelola taman laut dan c) memperkuat taman laut nasional dan co-management (pengelolaan bersama) KSDA, termasuk, training, dukungan teknologi, dukungan penegakan hukum bersama dan rencana pengelolaan taman nasional/KSDA ditinjau ulang, direvisi, dan disosialisasikan menggunakan teknis partisipatif.

Komponen Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan Mitra Bahari mempunyai

output sebagai berikut:

1. Kampanye penyadaran masyarakat: a) dukungan reproduksi dan menyebar luaskan material program yang berhasil (tahap satu, donor, LSM) level provinsi program, kabupaten dan desa, b) menciptakan, menghasilkan dan menyebar luaskan material baru mendukung co-management (pengelolaan bersama) dan manfaat perikanan karang di provinsi, kabupaten dan desa program, c) membina dan menggerakkan kepedulian di provinsi, kabupaten dan desa juga program penyuluhan dan d) mendukung jurnalis independen dan media. 2. Program Pendidikan: a) mengembangkan dan menghasilkan materi pendidikan terumbu karang untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, b) training guru dan c) pendidikan terumbu karang untuk anak-anak dan kaum muda. 3. Program Mitra Bahari: a) membina dan mendukung Kantor Nasional Kemitraan di Laut, b) mengerahkan kelompok penyuluh ahli, c) kalangan akademis didukung dan ditempatkan di kabupaten untuk mendukung kegiatan program, d) penempatan sarjana maupun pemberian beasiswa untuk mendukung kegiatan program, e) pembentukan "think tanks" untuk riset tanggapan di lima universitas/pusat riset dan f) ekspansi program latihan lapangan mendukung kegiatan program berbasis desa. 4. Komunikasi Pendukung Program: a) tahap II protokol komunikasi (visi, logo, branding, dan kop surat, b) pelatihan media untuk representasi program utama, c) sistem komunikasi internal, d) lembar informasi dan selebaran dan e) Humas untuk menghasilkan pemahaman yang jelas dan lugas tentang program tahap II kepada peserta.

Parameter yang akan digunakan dalam evaluasi proyek Coremap tahap II di tujuh kabupaten adalah: (1) penutupan karang hidup dalam program tingkat kecamatan bertambah 5% per tahun sampai tingkat perbandingan yang dicapai dan dipelihara pada karang karang yang dikelola dengan baik (pristine area) (2) total pendapatan (begitu juga jumlah orangnya) yang diperoleh dari aktivitas pengganti untuk menjaga sustainabilitas karang pada program tingkat kecamatan bertambah 10% pada akhir program (2009); dan sedikitnya 70% dari masyarakat nelayan di kabupaten program merasakan dampak positif Coremap, terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank, Project Appraisal Document, 2004 Appendix 3:39)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan pengujian hipotesis. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta bagaimana efektifitas pola kebijakan coremap II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Buton.

Untuk tujuan tersebut maka akan dilakukan pengumpulan data lapangan, analisis data dan interpretasi tentang data tersebut agar diperoleh gambaran yang jelas tentang efektifitas kebijakan coremap II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kabupaten Buton. Analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi dan persentase. Jenis penelitian ini adalah survey yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu berdasarkan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Penelitian survey mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan angket sebagai pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989:3).

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pola kebijakan Coremap II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Buton. Selain itu penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989:4). Sehubungan dengan pendapat Singarimbun tersebut dipertegas pula oleh Nawawi (1998:63) mengemukakan bahwa metode deskripsi diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tiga kecamatan dari 13 kecamatan wilayah binaan Coremap II di Kabupaten Buton. Pemilihan ketiga lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga kecamatan tersebut dianggap dapat mewakili dari sekian kecamatan wilayah Coremap II Kabupaten Buton. Pengambilan ketiga lokasi ini didasari pula oleh pertimbangan bahwa dari keseluruhan wilayah binaan Coremap terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Jadi untuk representatifnya pemilihan lokasi penelitian, maka dipilih berdasarkan perbedaan lokasi wilayah yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Adapun wilayah tersebut adalah Kecamatan Wabula mewakili wilayah daratan yang terdiri dari Desa Wasuempa dan Desa Wabula. Sedangkan dua wilayah kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Kadatua yang terdiri dari Desa Kaofe dan Desa Wa Onu dan Kecamatan Mawasangka terdiri dari Desa Wakambangura

dan Desa Gumanano. Ketiga wilayah kecamatan tersebut adalah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diharapkan dapat mewakili keseluruhan wilayah binaan *Coremap II* di Kabupaten Buton. Untuk memperjelas lokasi penelitian ini maka ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini

Tabel 3.1 Sebaran lokasi penelitian berdasarkan wilayah kecamatan dan desa

No	Kecamatan Wabula	Kecamatan Kadatua	Kecamatan Mawasangka
1	Desa Wasuemba	Desa Kaofe	Desa Wakambangura
2	Desa Wabula	Desa Wa Onu	Desa Gumanano

C. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah diambil berdasarkan sampel wilayah yang telah ditetapkan yaitu seluruh masyarakat binaan *Coremap II* yang mendapatkan bantuan *Seed Fun dan Block Grand* di tiga kecamatan dan enam desa yang telah ditetapkan pada sampel wilayah penelitian yaitu 228 orang. Terlalu besarnya populasi penelitian ini maka peneliti menentukan 50% responden pada setiap desa, sehingga responden penelitian ini berjumlah 114 responden dan dianggap telah mewakili keseluruhan wilayah binaan *Coremap II* Kabupaten Buton.

D. Sampel Penelitian

Teknik penarikan sampel dalam penelitian adalah menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja.

Tabel 3.2 Penyebaran sampel penerima dana Seed Fun pada setiap desa

No	Desa	Populasi	Sampel
1	Wasuemba	47	23
2	Wabula	62	31
3	Kaofe	25	13
4	Waonu	26	13
5	Wakambangura	32	16
6	Gumanano	36	18
Jumlah	6	228	114

Sumber: CBM Coremap II Buton, des 2008 (Sampel Wilayah Kecamatan)

Setelah sampel diketahui yaitu 114 responden, maka pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *random sampling*. Penarikan sampel secara random dilakukan dengan mengundi populasi yang berdasarkan kerangka sampling berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan sampai mencukupi kebutuhan sampel yang telah ditetapkan.

E. Instrumen Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan instrumen kuisioner (*Qiestinaire*) dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijarah dengan menggunakan insrtumen pedoman reveiew dokumen (*dokumen reveiew*), yaitu berupa arsip, laporan, peraturan-perturan, petunjuk teknis yang berhubungan dengan Pogram *Coremap II* Kabupaten Buton.

F. Teknik Pengolahan Data

Analisa data yang akan dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama yang dilakukan adalah seleksi data primer dan data sekunder. Data sekunder dikelompokkan, diolah lalu dideskripsikan dengan menggunakan tampilan berupa tabel frekuensi sedangkan data primer mula-mula diklasifikasikan, dikategorisasi, diverifikasi, dan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan data kemudian dilakukan tabel frekuensi dan persentase. Proses ini dilakukan secara bertahap berdasarkan informasi dari responden, informan dan hasil observasi lapangan sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat dan mempertinggi tingkat keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan penelitian. Proses ini dilakukan ketika masih berada di lapangan dan sesudah proses pengumpulan data. Dengan analisis selama pengumpulan data di lapangan diungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang harus dijawab, dan metode apa yang harus dipakai untuk mencari informasi baru (Moleong, 1995). Tujuan pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif ialah mendeskripsikan variabel berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat sebelumnya dengan bantuan tabel frekuensi.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Buton memiliki luas wilayah sebesar 24.129,580 Km², terdiri atas daratan seluas ± 3.075,58 Km² dan perairan laut ± 21.054 km². Data ini menunjukkan bahwa 87,26% dari luas wilayah Buton merupakan perairan laut dengan panjang garis pesisir pantai 521,0 Km, wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata Bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Kecamatan yang ada saat ini di Kabupaten Buton berjumlah 21 kecamatan yaitu: kecamatan yang terdapat di Pulau Buton yaitu Lasalimu, Sampolawa, Lasalimu Selatan, Batauga, Pasar Wajo, Kapontori, Siontapina, Wabula, Wolowa, Lapandewa, kecamatan yang terdapat di Pulau Muna yakni Mawasangka, Gu, Mawasangka Timur, Lakudo, Sangia Wambulu, Mawasangka Tengah, serta kecamatan yang terdapat di kepulauan yaitu Batu Atas, Siompu, Siompu Barat, Talaga Raya, dan Kadatua. Kecamatan terluas adalah Kapontori 39.170.48 Ha, menyusul Lasalimu 33.167.39 Ha dan Mawasangka 26.515.24 Ha; sedangkan terkecil adalah Batu Atas 867.42 Ha. Hingga tahun 2008 terdapat 179 desa dan 29 kelurahan di Kabupaten Buton.

Kabupaten Buton yang sebagian wilayahnya adalah wilayah pesisir dan laut sudah memanfaatkan laut, baik sebagai marine resources maupun sebagai maritim

(transportasi). Hal ini dapat ditunjukkan pada kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perolehan PAD cukup signifikan. Namun keadaan sumberdaya pesisir dan lautnya tidak terlepas dari berbagai persoalan yakni antara lain kerusakan biofisik sumber daya pesisir dan laut, seperti penurunan drastis luas areal kawasan terumbu karang dan mangrove di Kecamatan Kapontori, sebagian Lasalimu dan Kawasan Gulamas (Gu, Lakudo dan Mawasangka). Kerusakan terumbu karang diakibatkan oleh penambangan dan pemboman yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan. Seiring dengan kerusakan biofisik juga terjadi degradasi nilai sosial, dimana terjadi kehilangan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut Kabupaten Buton.

Hingga saat ini wilayah cakupan Coremap Buton meliputi 14 kecamatan yakni Kecamatan Lasalimu Selatan, Siontapina, Iapandewa, Wabula, Sampolawa, Batauga, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Kadatua, Siompu, Siompu Barat, Talaga Raya dan Kecamatan Batuatas dengan jumlah desa sasaran hingga tahun 2008 adalah 43 desa.

Kegiatan Coremap Kabupaten Buton merupakan suatu langkah strategis dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang. Program ini dianggap sangat penting, karena diharapkan dapat memecahkan dua permasalahan yaitu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya terumbu karang. Hal ini mengandung pengertian bahwa selain kelestarian terumbu karang tetap lestari, masyarakat yang hidup di daerah-daerah pesisir dapat hidup dengan sejahtera secara berkelanjutan.

1. Kecamatan Mawasangka

Kecamatan Mawasangka, salah satu kecamatan di Kabupaten Buton, secara geografis berada pada 5,29°-5,59° Lintang Selatan dan 122,14°-122,38° Bujur Timur. Topografi Kecamatan Mawasangka terdiri dari daratan berpasir di daerah sepanjang pantai dan daerah daratan berbatu. Jenis tanah yang kurang subur menyebabkan hanya ada beberapa jenis tanaman tertentu yang tumbuh seperti jambu mente, coklat, kelapa, jagung, kacang dan ubi. Hasil laut merupakan mata pencaharian utama penduduk di wilayah ini. Daerah binaan Coremap Kabupaten Buton di Kecamatan Mawasangka terdiri dari 4 desa, yaitu desa Terapung, desa Kancebungi, desa Wakambangura dan desa Gumanano.

Wilayah laut di sekitar Kecamatan memiliki potensi terumbu karang yang cukup besar, terutama di Desa Wakambangura. Pada sepanjang garis pantai di Desa wakambangura membujur terumbu karang yang menurut masyarakat setempat merupakan karang terpanjang di Kabupaten Buton. Keberadaan karang ini menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan, biota laut dan rumput laut.

2. Kecamatan Kadatua

Pulau Kadatua adalah salah satu pulau kecil yang terletak di sebelah barat Pulau Buton. Kecamatan Kadatua memiliki luas wilayah daratan sekitar 23,67 Km². Secara geografis, Kecamatan Kadatua terletak antara 5,29° Lintang Selatan – 5,59° Lintang Selatan dan 122,14° Bujur Timur – 122,38° Bujur Timur. Kecamatan Kadatua memiliki struktur pantai yang terdiri dari pantai ber dinding batu cadas yang tersebar dan cukup merata di pulau tersebut.

Kecamatan Kadatua dideskripsikan oleh penduduk maupun pemerintah lokal sebagai daerah miskin sumber daya alam. Kemiskinan sumber daya alam ini yang sering dikemukakan sebagai faktor utama mengapa penduduk miskin, pendidikan tertinggal dan pembangunan terbelakang. Tanah bebatuan berkapur, sulit air dan kurang hasil laut. Walaupun hasil laut di Kecamatan Kadatua ini kurang banyak, tapi sebagian penduduk mencurahkan banyak waktunya untuk mencari bulu babi, gurita, kerang-kerangan serta usaha rumput laut yang kesemuanya merupakan usaha di area pantai di Pulau Kadatua tersebut.

3. Kecamatan Wabula

Kecamatan Wabula dilihat dari peta Kabupaten Buton berada disebelah timur daerah Pulau Buton. Dari letak Geografisnya Kecamatan Wabula terletak dibagian selatan garis katulistiwa. Kecamatan Wabula terletak antara $122,32^{\circ}$ - $122,40^{\circ}$ Bujur Timur dan antara $5,14^{\circ}$ - $5,30^{\circ}$ Lintang Selatan yang berada di sebagian kecil daratan Pulau Buton, dengan luas wilayah sekitar $51,58 \text{ Km}^2$.

Sesuai keadaan wilayah Kecamatan Wabula yang sebagian besar wilayah desa atau kelurahan terletak didaerah pesisir pantai, sehingga masyarakat pesisir cenderung memanfaatkan potensi laut sebagai salah satu mata pencaharian atau bisa disebut petani nelayan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan pada 114 responden untuk mengetahui implementasi program *Coremap* di Kabupaten Buton. Berikut ini analisis data responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan responden. Setelah itu dikemukakan mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis. Deskripsi data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif sedangkan pengujian hipotesis dianalisis dengan teknik statistik inferensial.

Berikut ini analisis data responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner seperti usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden.

Tabel 4.1 Usia Responden (dalam tahun)

No	Usia Responden	F	%
1	20 – 29	5	4.38
2	30 – 34	7	6.14
3	35 – 39	14	12.28
4	40 – 44	28	25
5	45 – 49	24	21
6	50 – 54	22	19
7	55 – 60	14	12.28
	Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas usia responden berkisar antara 40–44 tahun sebesar 25% atau sebanyak 28 responden. Besarnya jumlah responden pada usia tersebut karena seseorang pada usia ini merupakan usia produktif, dimana para

anggota masyarakat telah memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan serta masih memiliki stamina yang prima dalam melakukan aktivitasnya.

Responden yang berusia antara 45–49 tahun yaitu sebesar 21% atau 24 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia ini masih tergolong usia produktif dalam melakukan bentuk pekerjaan fisik. Selain mereka melakukan pekerjaan sebagai pembudidayaan rumput laut, mereka juga memiliki pekerjaan sebagai nelayan, sebagaimana mata pencaharian utama mereka. Sementara responden yang berusia antara 50–54 yaitu sebesar 19% atau sebanyak 22 responden. Sedangkan responden yang berusia antara 20–29, 30–34, 35–39 berada pada besaran antara 4% dan 12% atau masing-masing sebanyak tujuh dan empat belas orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden adalah memiliki tingkat usia yang masih sangat produktif untuk melakukan berbagai aktifitas dalam mengembangkan kegiatan melaut dan budi daya rumput laut.

Sementara itu responden yang berusia antara 55–60 tahun adalah sebesar 13% atau 15 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut kecenderungannya semakin menurun untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan dan pembudidayaan rumput laut, dan bahkan pada usia ini mereka mulai berangsur-angsur mulai meninggalkan pekerjaan yang memerlukan kondisi fisik yang kuat dan mencari pekerjaan yang dianggap ringan sesuai dengan kemampuan mereka, karena secara fisik pada usia tersebut sudah berangsur-angsur mulai menurun, sehingga untuk menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan fisik dianggap sudah tidak produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Guiner (dalam Zawani, 1994) bahwa penduduk yang tergolong usia 50 tahun keatas sudah mulai menurun fisik seseorang.

Tingkat produktivitas para nelayan dan pembudidaya rumput laut dalam melakukan kegiatan usaha mereka turut ditentukan oleh kondisi fisik seseorang, karena semakin memasuki usia tua seseorang semakin rendah pula produktivitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	f	%
1	Laki-laki	58	51
2	Perempuan	56	49
	Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah,2009)

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas jenis kelamin responden di lokasi penelitian adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 51% atau 58 responden. Besarnya jumlah responden laki-laki yang memilih untuk menekuni usaha perikanan dalam hal ini nelayan dan pembudidayaan rumput laut disebabkan karena pekerjaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Pembudidayaan rumput laut dalam pengembangan dan pengelolaannya tidak membutuhkan tenaga dan waktu yang terlalu besar. Oleh sebab itu pembudidayaannya sangat diminati oleh masyarakat, karena selain sesuai dengan kondisi iklim di wilayah tersebut. Sedangkan responden perempuan yang memilih pekerjaan budi daya rumput laut adalah sebesar 49% atau 56 responden. Pada umumnya perempuan yang menekuni usaha rumput laut adalah bekerja pada saat pascapanen, dimana mereka lebih banyak berperan ketika hasil

panenan rumput laut membutuhkan tenaga kerja perempuan untuk melakukan pengeringan dan sebagai tenaga administrasi dan keuangan dalam kelompok usaha.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Reponden

No	Pendidikan Formal	Frekuensi	Persentase
1	Tamat SD	40	35
2	Tamat SLTP	43	38
3	Tamat SLTA	25	22
4	Sarjana	6	5
	Jumlah	114	100.00

Sumber : Data Penelitian (Diolah, 2009)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden adalah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu sebesar 38% atau sebanyak 43 responden. Sementara itu responden yang menamatkan dirinya pada Sekolah Dasar adalah sebesar 35% atau sebanyak 40 responden. Responden yang Tamat Sekolah Tanjutan Tingkat Atas adalah sebesar 22% atau sebanyak 25 responden. Sedangkan yang memiliki kualifikasi sarjana adalah sebesar 5% atau sebanyak 6 responden.

Jika dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan responden menunjukkan adanya persebaran yang terdistribusi normal pada setiap jenjang pendidikan. Jika dihubungkan dengan adanya kualifikasi pendidikan yang dimiliki responden dengan pelaksanaan program *Coremap* di Kabupaten Buton, maka dapat diprediksi akan cukup memberikan kemudahan dalam proses sosialisasi program *Coremap* pada masyarakat, karena dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai yang dimiliki

masyarakat akan lebih memudahkan proses penerimaan ide dan gagasan baru yang akan disampaikan pada responden.

2. Gambaran implementasi program Coremap II di Kabupaten Buton

Implementasi kebijakan *Coremap* pada tahap awal akan di difusikan melalui sosialisasi program sebagai proses awal untuk memperkenalkan *Coremap* kepada masyarakat sasaran program yakni masyarakat pesisir sebagai subyek dan obyek penelitian. Setelah sosialisasi program pada tahap selanjutnya akan diikuti dengan pelaksanaan program melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sasaran program. Dalam pandangan Rogers bahwa melalui proses pendidikan dan pelatihan tersebut akan mendifusikan berbagai inovasi pemikiran dari pihak *innovator*. Peran *innovator* dalam mendifusikan berbagai inovasi pemikiran kepada masyarakat sasaran program dilakukan melalui saluran komunikasi untuk menyebarkan ide dan gagasan-gagasan baru untuk suatu perubahan pada masyarakat. Dalam proses pendifusian ide dan gagasan-gagasan baru oleh pihak *innovator* adalah suatu proses keputusan untuk menerima dan menolak suatu gagasan atau ide-ide tentang pembangunan.

Implementasi program *Coremap* II Kabupaten Buton pada prinsipnya dilakukan melalui suatu proses kerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya guna tercapainya sasaran program *Coremap*. Implementasi *Coremap* tersebut dapat dilihat melalui:

- a. Kinerja (*Performance*) Unit Pengelola (mis: NCU, LIPI, PHKA, RCU, PMU).

Perkembangan kinerja *Coremap* Buton telah berjalan dengan baik. Kendatipun demikian kadang-kadang masih dijumpai adanya hambatan terutama hambatan non

teknis dalam usaha percepatan perkembangan program *Coremap*. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia *Coremap* II Kabupaten Buton baik itu staf maupun SETO/CF serta MD telah dilakukan berbagai macam pelatihan. Hal ini berdampak pada akselerasi efektivitas kerja dan peningkatan pengetahuan dalam menunjang kerja dan program yang dijalankan oleh *Coremap* II Kabupaten Buton.

b. PMU-Kinerja team Lapangan seperti SETO, CF dan VM).

Guna menyelaraskan implementasi program *Coramep* pada setiap desa yang berada pada wilayah binaannya, maka *Coramep* menunjuk *SETO* (*Senior Extension Training Officer*) sebanyak tujuh orang dan *CF* (*community fasilitator*) sebanyak 14 orang serta fasilitator desa sebanyak 28 orang. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 jumlah *SETO* dan *CF* menjadi sembilan orang dan *CF* (*community fasilitator*) sebanyak 19 orang. Sementara untuk tiap desa, sampai tahun 2007 telah terpilih 86 motivator desa oleh masyarakat setempat yang difasilitasi oleh *CF* (*community fasilitator*). Jumlah motivator desa terdiri dari 43 motivator desa laki-laki dan 43 orang motivator desa perempuan.

Dalam rangka implementasi dan meningkatkan efektifitas kerja *Coremap* di desa, maka dibentuk kelembagaan ditingkat desa yang sejak tahun 2005 dan 2006 telah terbentuk sebanyak 28 LPS-TK, 84 kelompok masyarakat, 28 Siswasmas sudah terbentuk di setiap desa. Pada tahun 2007 telah terbentuk 43 LP-STK, 129 kelompok masyarakat serta 43 Siswasmas. Penambahan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah desa *Coremap* II Kabupaten Buton.

Senior Extension and Training Officer (SETO) adalah pihak yang diangkat secara khusus oleh PMU untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan

pengelolaan berbasis masyarakat di lokasi-lokasi *Coremap*. *SETO* akan bertugas selama masa kontrak. *SETO* berkoordinasi dengan *PMU* dan Camat. Ruang lingkup area pekerjaan tergantung dengan kondisi lokal lokasi program.

Fasilitator masyarakat adalah pihak yang diangkat secara khusus oleh *PMU* untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat *Coremap* di lokasi-lokasi terpilih. Fasilitator masyarakat akan bertugas selama masa kontrak dan berkedudukan di desa/pulau. *Village Motivator* atau Motivator Desa adalah pihak yang pilih dan diangkat oleh masyarakat setempat secara demokratis sebanyak dua orang, yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam kerangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan berbasis masyarakat *Coremap*. Motivator Desa akan bertugas selama masa kontrak dan berkedudukan di desa/pulau.

- c. *PMU*- Hasil-hasil Lembaga Pengelola Sumber daya Terumbu Karang (LPSTK) seperti: RPTK, DPL, Perdes, MPA (AIG)

Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) adalah suatu organisasi yang terdiri dari wakil-wakil kelompok masyarakat (pokmas) ditambah dengan motivator desa. Pembentukan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) ini difasilitasi oleh fasilitator masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan BPD. Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan *PMU*. Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) mempunyai peran memberikan dukungan

operasional kepada kelompok masyarakat (Pokmas) khususnya untuk meningkatkan kinerja masing-masing kelompok masyarakat (Pokmas) sesuai bidang kipahnya.

Adapun tugas Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) antara lain sebagai berikut : (1) menerima dan menyalurkan dana bantuan desa untuk pembangunan prasarana sosial (*village grant fund*) kepada masyarakat (2) mencatat dan mendokumentasikan kegiatan Pokmas (3) membukukan penggunaan dana bantuan (4) membantu pembuatan RPTK terpadu (5) membantu mengatasi penyelesaian kelompok masyarakat (Pokmas) bermasalah (6) melakukan pemeriksaan pembukuan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam satuan mingguan, bulanan dan tahunan (7) berperan sebagai tim verifikasi dalam memeriksa usulan proposal kelompok masyarakat (Pokmas) (8) membantu melakukan identifikasi seluruh potensi dan mengembangkan investasi usaha Pokmas (9) membantu menyeleksi lembaga keuangan penyalur *Seed Fund Desa* dan *Village Grant* (10) mengevaluasi kinerja kerja motivator desa dan melakukan pelaporan ke PMU (11) mengelola pusat informasi masyarakat dan (12) membuat pelaporan pelaksanaan RPTK kepada pemerintah desa. Hasil monitoring dan evaluasi tentang Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) di Kecamatan Siompu menunjukkan bahwa keempat desa wilayah Coremap sudah terbentuk LPSTK. Lembaga inilah yang menjadi lembaga perwakilan masyarakat dalam menentukan rencana pengelolaan terumbu karang di desa masing-masing. Melalui lembaga ini juga masing-masing desa *Coremap* menyusun Peraturan Desa (Perdes) dan menetapkan Daerah

Perlindungan Laut (DPL). Tugas-tugas LPSTK pada masing-masing desa sudah berjalan sebagaimana disebutkan terdahulu.

Sejak tahun 2005 dan 2006 oleh fasilitasi LPSTK, telah terbentuk 28 RPTK dan pada tahun 2007 telah terjadi penambahan desa sehingga telah tersusun 43 RPTK. Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Terpadu yang dibuat sendiri oleh masyarakat merupakan cerminan dari kepedulian dan tanggung jawab masyarakat untuk melindungi serta melestarikan potensi sumber daya laut khususnya terumbu karang. Dengan RPTK yang ada di 43 Desa, diharapkan, kondisi terumbu karang di wilayah *Coremap II* Kabupaten Buton tetap lestari atau tidak ada lagi pengrusakan terumbu karang yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, sehingga daya dukung ekologis dan ekonomis dari terumbu karang dapat menopang pelaksanaan pembangunan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan terumbu karang adalah: (1) kelompok pengelolaan yang aktif dan efektif (2) dukungan masyarakat secara luas, dan (3) kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam menopang dokumen RPTK, tiap Desa juga telah mempunyai dokumen Analisis Potensi Sumberdaya Desa dengan Metode *PRA (participatory rural appraisal)* atau kajian keadaan pedesaan secara partisipatif merupakan salah satu dokumen penting bagi desa, secara keseluruhan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa saat ini masih banyak yang belum teridentifikasi khususnya bagi wilayah pedesaan atau kelurahan di Kabupaten Buton. Khususnya di wilayah desa baru program *Coremap II* Kabupaten Buton saat ini, data/informasi masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh kondisi administrasi wilayah Kabupaten masih dalam transisi

pemekaran wilayah khususnya di beberapa tempat kecamatan, sehingga menyulitkan bagi proses pendataan dan penyediaan data/informasi secara akurat, akibatnya di beberapa desa belum memiliki data otentik tentang desa. Kegiatan ini selain pengambilan datanya diperoleh langsung (melalui diskusi/musyawarah ditingkat desa, yang dihadiri perwakilan kelompok-kelompok masyarakat ditingkat desa) untuk itu perlu ditambahkan dengan beberapa data penunjang lainnya. Untuk melihat potensi sumberdaya desa, dokumen PRA yang disusun mengacu pada kajian potensi sumberdaya yang berdasarkan data-data atau informasi pada masing-masing desa. Pentingnya dokumen ini dibuat untuk mendukung kegiatan program *Coremap II* di wilayah Kabupaten Buton di masing-masing desa selain itu dapat menjadi pertimbangan penting bagi program dalam menyelaraskan jenis kegiatan program dan potensi desa yang dimiliki.

Perdes merupakan peraturan desa yang lebih banyak mengatur tentang Daerah Perlindungan laut. Perdes dan DPL merupakan pengelolaan yang nyata yang terwujud pada saat pengguna sumberdaya menyepakati dan mengikuti kesepakatan tersebut. Di tingkat desa perlu waktu yang panjang untuk menentukan kontribusi pencapaian pengelolaan perikanan karang secara berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan tidak akan terjadi jika sebagian pengguna sumberdaya tidak menyepakati untuk mengikuti kesepakatan dan saling menjaga kesepakatan tersebut. 43 Desa di wilayah *Coremap* sudah menyusun Peraturan Desa (Perdes). Mekanisme proses penyusunan peraturan desa diurai sebagai berikut : (1) Lakukan diskusi yang melibatkan masyarakat, aparat desa, dan pihak lain yang terkait, (2) Kelompokkan peserta diskusi ke dalam empat kelompok, (3) masing-masing kelompok membuat rumusan sesuai dengan bidang

tugasnya dan (4) bahas hasil rumusan masing-masing kelompok bersama-sama agar diperoleh keselarasan hubungan antara jenis-jenis sumberdaya, ketentuan-ketentuan pemanfaatan, larangan dan sanksi.

Dalam pelaksanaannya, *Coremap* II selalu melibatkan masyarakat sehingga dalam penelitian ini penulis telah menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara dengan masyarakat wilayah *Coremap* guna mengetahui sampai sejauh mana implementasi ataupun pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program *Coremap* berikut ini akan diemukakan tanggapan responden tentang implementasi pelaksanaan program *Copremap* pada hal-hal berikut ini:

Tabel 4.4 Tanggapan Responden tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program *Coremap*

No	Implementasi Kebijakan tentang Kegiatan <i>Coremap</i> Sosialisasi	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	<i>Coremap</i> mensosialisasikan kebijakan programnya ke seluruh masyarakat	110	96	4	4	114	100
2	<i>Coremap</i> mengajak bekerja sama dengan masyarakat dalam sosialisasi programnya	110	96	4	4	114	100
3	<i>Coremap</i> tidak membedakan masyarakat dalam proses sosialisasi programnya	109	96	4	5	114	100
4	<i>Coremap</i> mensosialisasikan terlebih dahulu pelaksanaan program yang akan dilakukannya	111	97	3	3	114	100
5	<i>Coremap</i> tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat dalam sosialisasi kebijakan programnya	108	95	5	5	114	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah, 2009)

Implementasi kebijakan *Coremap* dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa responden menanggapi bahwa *Coremap* telah mensosialisasikan programnya keseluruhan masyarakat di wilayah binaannya. Tanggapan responden bahwa *Coremap* telah melaksanakan sosialisasi kebijakannya adalah sebesar 96% atau 110 responden. Sementara itu responden mengatakan bahwa *Coremap* telah mengajak bekerja sama dengan masyarakat dalam proses sosialisasi kebijakan programnya adalah sebesar 96% atau sebanyak 110 responden. Sementara itu yang mengatakan bahwa *Coremap* belum sepenuhnya mengajak masyarakat dalam proses sosialisasi programnya adalah sebesar 4% atau sebanyak 4 responden. Dalam proses sosialisasi programnya *Coremap* tidak pernah membedakan masyarakat dalam upaya memberikan pemahaman dalam rangka sosialisasi programnya. Dari sebaran kuisioner diperoleh jawaban responden bahwa ternyata *Coremap* melakukan sosialisasi programnya keseluruhan masyarakat yaitu sebesar 96% atau sebanyak 109 responden dan hanya lima responden yang menyatakan bahwa *Coremap* kadang-kadang membedakan masyarakat dalam proses sosialisasi programnya. Selain itu juga *Coremap* mensosialisasikan terlebih dahulu pelaksanaan program yang akan dilakukannya sebelum melakukan kegiatan program di lapangan, sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan pelaksanaan program-program yang dilakukan *Coremap*. Tanggapan responden mengenai item pertanyaan tersebut adalah sebesar 97% atau sebanyak 111 responden dan hanya 3 responden yang mengatakan *Coremap* belum sepenuhnya melakukan sosialisasi pada masyarakat kegiatannya telah dilaksanakan dilapangan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan program *Coremap* adalah menunjukkan hal yang sangat positif, dimana responden menanggapi bahwa *Coremap* tidak

mendapatkan penolakan dari masyarakat dalam sosialisasi kebijakan programnya adalah sebesar 95% atau sebanyak 108 responden dan hanya 5% responden mengatakan bahwa *Coremap* mendapat penolakan dari masyarakat mengenai beberapa kebijakan programnya.

Implementasi kebijakan *Coremap* yang terkait dengan sosialisasi program menunjukkan bahwa *Coremap* telah mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton jika dihubungkan dengan pandangan pemikiran Anderson dalam Sunggondo dan Bambang (1994:8), bahwa implementasi adalah upaya mewujudkan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan. Implementasi sering menunjuk keseluruhan proses tujuan dan merujuk pada hasil suatu rencana yang nyata. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2006: 146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Pandangan pemikiran Anderson tersebut cukup relevan dengan realitas implementasi kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton dimana programnya telah mencapai sasaran-sasaran programnya yakni telah mencapai tujuan programnya yaitu mengubah pola pikir masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya peran serta masyarakat lokal dalam menjaga pelestarian terumbu karang.

Tabel 4.5 Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan *Coremap* yang berhubungan dengan Pendidikan dan Pelatihan

No	Implementasi Program <i>Coramep</i> tentang Pendidikan & Pelatihan	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	Penyusunan PRA	109	96	5	4.4	114	100
2	Pembuatan RPTK	102	89	12	11	114	100
3	Penyusunan Perdes	102	89	12	11	114	100
4	Pelatihan pegelolaan perikanan berkelanjutan	95	83	19	17	114	100
5	Pelatihan daerah perlindungan laut	100	88	14	12	114	100
6	Pelatihan teknis dan manajemen usaha perikanan	98	86	16	21	114	100
7	Pelatihan pengembangan usaha perikanan	98	86	16	21	114	100
8	Pelatihan infestigasi penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	95	83	19	17	114	100
9	Lokakarya strategi penyadaran masyarakat	100	88	14	12	114	100
10	Pelatihan wanita nelayan	102	89	12	11	114	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah, 2009)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 10 item pertanyaan yang diajukan pada responden menggambarkan bahwa implementasi program *Coremap* II di Kabupaten Buton telah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk lebih memberi penjelasan yang lebih konkrit mengenai implementasi kebijakan program *Coramep* II Kabupaten Buton yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, akan dideskripsikan mengenai penjelasan tabel tersebut di atas sebagai berikut:

Tanggapan responden mengenai implementasi kebijakan *Coremap* tentang pendidikan dan pelatihan menunjukkan bahwa bahwa *Coremap* telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyusunan PRA, pelatihan Pembuatan daerah

perlindungan laut (DPL), lokakarya strategi penyadaran masyarakat dan pelatihan wanita nelayan yaitu sebesar 96% atau sebanyak 109 responden.

Kebijakan *coremap* dalam memberikan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat jika dilihat dari tanggapan responden tersebut di atas menggambarkan bahwa *coremap* telah mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung usaha penyelamatan terumbu karang dari kerusakannya. Sementara itu responden yang menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan pelatihan mengenai: penyusunan RPTK, pelatihan penyusunan Perdes dan pelatihan pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah berkisar antara 83% sampai dengan 89% atau sebanyak 102, dan 95 responden. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa telah mengikuti pelatihan teknis dan manajemen usaha perikanan, pengembangan usaha perikanan dan pelatihan infestigasi penangkapan ikan tidak ramah lingkungan adalah masing-masing sebesar 86% atau sebanyak 98 responden.

Implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton mengenai pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil rangkuman dari jawaban responden menggambarkan bahwa *coremap* telah melakukan berbagai jenis pelatihan pada masyarakat pesisir binaan *coremap*. Jika dihubungkan dengan teori Difusi Inovasi mengenai implementasi *Coramep* tersebut maka pihak *innovator* (*Coremap* secara kelembagaan) dapat dikatakan telah melakukan proses difusi untuk suatu inovasi terhadap masyarakat sasaran program *Coremap*. Hal ini terbukti bahwa dari 114 responden sebagian besar responden mengatakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh *Coremap*. Besarnya minat masyarakat pesisir untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan tersebut karena diilhami oleh rasa

ingin tahu terhadap sasaran program *Coremap* tersebut. Dalam suatu proses difusi ada yang dikatakan dengan istilah ketidakpastian informasi mengenai suatu program. Ketidakpastian adalah suatu derajat di mana sejumlah alternatif dirasakannya berkaitan dengan suatu peristiwa beserta kemungkinan-kemungkinan pada alternatif tersebut. Derajat ketidakpastian oleh seseorang dapat dikurangi dengan jalan memperoleh informasi. Pihak masyarakat sebagai sasaran pemberian ide suatu inovasi dalam keterlibatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh *Coremap* adalah sebagai wujud dari keingintahuannya dan mengurangi ketidakpastian terhadap ide inovasi yang dilancarkan *Coremap*. Dengan proses tersebut maka masyarakat mulai mengetahui gagasan-gagasan pihak *Coremap* ternyata memiliki visi untuk lebih meningkatkan derajat kehidupan masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut di atas sesuai dengan pandangan Edwards dalam Winarno (2008: 174) menyatakan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yakni: Prakondisi-parkondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selain masalah komunikasi yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai sumber-sumber penunjang lain.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan Coremap di Kabupaten Buton cukup sesuai dengan konsep pemikiran Edwards, dimana pihak Coremap telah melaksanakan proses pengkomunikasian kebijakan melalui transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*) suatu proses pemberian atau pendifusian ide dan gagasan-gagasan baru tentang pentingnya usaha pelestarian terumbu karang dari kerusakan yang telah terjadi, sehingga dengan adanya implementasi kebijakan Coremap usaha pelestarian terumbu karang dapat tercapai. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selain masalah

komunikasi yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai sumber-sumber penunjang lain.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna pelayanan-pelayanan publik.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program *Coremap*

No	Implementasi Kebijakan tentang Kegiatan Sosialisasi	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	Merespon positif pelaksanaan Kebijakan <i>Coremap</i>	109	96	5	4	114	100
2	Pelaksanaan kebijakan <i>Coremap</i> bekerja sama dengan masyarakat	109	96	5	4	114	100
3	Ikut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan <i>Coremap</i>	111	97	3	3	114	100
4	Berperan dalam pengawasan terumbu karang	98	86	16	14	114	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah, 2009)

Implementasi kebijakan *Coremap* dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa responden menanggapi positif pelaksanaan kebijakan *Coremap* dan pelaksanaan kebijakan *Coremap* bekerja sama dengan masyarakat yaitu sebesar 96% atau 109 responden. Sementara itu responden ikut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan *Coremap* dan berperan dalam pengawasan terumbu karang memperoleh

persentase sebesar 96% atau sebanyak 109 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata implementasi kebijakan *Coremap* adalah direspon positif oleh masyarakat pesisir dan mereka turut dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan *Coremap*. Sambutan positif responden atas implementasi kebijakan *Coremap* adalah merupakan realitas keberhasilan implementasi kebijakan *Coremap* seperti yang telah dijlaskan sebelumnya. Respon positif masyarakat atas kebijakan *Coremap* adalah merupakan wujud nyata bahwa *Coremap* telah berhasil dalam melaksanakan program pelestarian terumbu karang. Realitas tersebut di atas sesuai dengan konsep pemikiran Anderson bahwa implementasi adalah upaya mewujudkan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan. Implementasi sering menunjuk keseluruhan proses tujuan dan merujuk pada hasil suatu rencana yang nyata. Pemikiran Anderson tersebut dipertegas oleh kondep pemikiran Edwards dalam Winarno (2008:174) yang menyatakan bahwa persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Selain masalah komunikasi yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah mengenai sumber-sumber penunjang lain.

Jika dihubungkan dengan paradigma berfikir Rogers mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir di Kabupaten Buton yang menjadi sasaran program *Coremap* ternyata memiliki hubungan yang sangat erat, dimana jika ada kesesuaian antara kebutuhan pihak yang dilakukan difusi inovasi dengan pihak inovator maka akan terjadi kemungkinan untuk mencoba gagasan yang dilancarkan oleh pihak inovator dalam hal ini adalah pihak *Coremap*. Dengan melihat realitas yang terjadi maka kecenderungan masyarakat untuk mengikuti inovasi-inovasi yang dilakukan

Coremap akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keputusan untuk menerima inovasi adalah sangat besar. Sementara itu responden yang telah terlibat dan ikut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan *Coremap* adalah sebesar 97% atau sebanyak 111 responden dan 86% responden telah berperan dalam mengawasi pelestarian terumbu karang. Hal ini menggambarkan bahwa ternyata program *Coremap* telah mampu menggerakkan sumber daya masyarakat agar mereka turut terlibat dalam usaha pelestarian terumbu karang dan lingkungan alam kelautan pada umumnya.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden tentang Kebijakan *Coremap* yang berhubungan dengan Usaha Mensejahterakan Masyarakat

No	Implementasi Kebijakan <i>Coramep</i> tentang Usaha Mensejahterakan Masyarakat	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	Usaha mensejahterakan masyarakat	100	88	14	12	114	100
2	Usaha memperkuat modal usaha masyarakat	98	86	16	14	114	100
3	Usaha meningkatkan produksi berkelanjutan	98	86	16	14	114	100

Implementasi kebijakan program *Coramep* II Kabupaten Buton yang terkait dengan usaha mensejahterakan masyarakat adalah terlihat pada jawaban responden bahwa *Coremap* telah melakukan program untuk memperkuat modal usaha masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha melalui *Seet Fun* dan *Block Grand*. Terbukti bahwa dari 114 responden memberikan jawaban bahwa implementasi kebijakan *Coremap* dalam memperkuat modal masyarakat adalah sebesar 86% atau sebanyak 98 responden. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa

masyarakat telah mendapatkan penguatan modal untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Jika dilihat hasil frekuensi dan persentase dari jawaban yang diberikan responden ternyata kebijakan *Coramep* telah diterapkan dan dijalankan berdasarkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Penerapan kebijakan *Coremap* tergambar pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan *Coremap* ternyata telah diterapkan untuk usaha peningkatan produksi masyarakat sasaran program yang berkelanjutan. Dari sebaran kuisioner pada 114 responden diperoleh hasil bahwa sebesar 88% atau sebanyak 100 responden menyatakan bahwa kebijakan *Coremap* telah mengusahakan dan menerapkan berbagai program agar masyarakat sasaran program dapat meningkatkan produksinya secara berkelanjutan demi terwujudnya keberhasilan dari program *Coramep* guna menciptakan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkelanjutan.

Selanjutnya item pertanyaan kuisioner apakah *Coremap* telah mengusahakan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tabel di atas menunjukkan bahwa 86% atau sebanyak 98 responden menyatakan kebijakan *Coremap* telah menjaklankan program yang berhubungan dengan upaya mensejahterakan masyarakat sasaran program dan hanya 16% atau delapan responden yang menyatakan bahwa *Coremap* belum atau tidak pernah ada program *Coremap* yang selalu berusaha untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. Dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, jika dianalisis secara mendalam persentase atas jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa ternyata kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton telah diimplementasikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh *Coremap*. Hal ini

didukung pula dengan kenyataan di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti, ternyata *Coremap* sangat gencar melakukan kampanye guna memberi pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat pesisir agar memiliki kemampuan untuk membangun sektor ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa di wilayah pesisir.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan *Coramep* II di Kabupaten Buton dianggap telah berjalan dengan baik dan masyarakat merespon dengan positif kebijakan *coremap* tersebut, karena masyarakat telah mendapatkan berbagai keterampilan dan modal pada kelompok-kelompok usaha masyarakat. Pernyataan tersebut di atas didukung pula dengan pernyataan oleh salah seorang informan dari tokoh masyarakat dari wilayah binaan *Coremap*, menyatakan bahwa:

“*Coremap* dalam dua tahun terakhir telah melaksanakan berbagai program untuk memberikan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan teknis kepada masyarakat pesisir, agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan penghasilan dan perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir. *Coremap* II di Kabupaten Buton telah melakukan berbagai macam pelatihan untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Kehadiran atau keberadaan *Coremap* di desa kami diterima dengan positif oleh masyarakat karena *Coremap* telah memberikan bantuan modal usaha pada kelompok-kelompok usaha masyarakat” (Wawancara Januari 2009)

Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan pihak *Coremap* adalah mulai meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk membuat perumahan dan menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan bahkan samapai pada tingkat perguruan tinggi. Meningkatnya pendapatan masyarakat adalah merupakan wujud nyata dari mulai tumbuhnya

kegiatan ekonomi produktif pada masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif sekaligus dapat mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Implementasi kebijakan *Coremap* secara teknis telah melakukan berbagai bentuk program kegiatan pelatihan untuk mendukung keberhasilan program yang dijalankan. Program-program tersebut diantaranya adalah: (1) pelatihan selam dasar dan SAR, (2) pelatihan pemantauan terumbu karang dan ikan, (3) pelatihan BME, Sosek dan Ekologi, (4) pelatihan pengelolaan perikanan berkelanjutan, (5) pelatihan daeh perlindungan laut, (6) pelatihan budidaya laut, (7) pelatihan teknis dan manajemen usaha perikanan, (8) Training Village Financial Managent, (9) pelatihan pengembangan usaha perikanan, (10) pelatihan investigasi penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, (11) lokakarya strategi penyadaran masyarakat, (12) Workshop guru untuk mengembangkan muatan lokal, (13) Pelatihan CREEL dan (14) Pelatihan Wanita Nelayan.

Kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut di atas akan berdampak pada penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat pesisir binaan *Coremap*. Jika dihubungkan dengan pernyataan responden bahwa *Coremap* telah berusaha mensejahterakan masyarakat, memperkuat modal usaha dan berusaha meningkatkan produksi berkelanjutan adalah memiliki hubungan yang nyata dan sangat positif, karena dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh *Coremap* maka masyarakat diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi dan akan lebih mengarah pada pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu responden yang menyatakan bahwa kebijakan program *Coramep* dapat memperkuat modal usaha masyarakat menunjukkan sebesar 82% atau sebanyak 98 responden. Hal ini memmmberi gambaran bahwa terdapat hubungan antara produktifitas masyarakat yang tinggi dengan kekuatan modal yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat modal masyarakat, *Coremap* telah memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha produktif masyarakat.

Tabel 4.8 Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan *Coremap* yang berhubungan dengan Pembedayaan Masyarakat

No	Implementasi Kebijakan <i>Coremap</i> tentang Pemberdayaan Masyarakat	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	<i>Coremap</i> aktif dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat	114	100	0	0	114	100
2	Memberdayakan masyarakat pesisir	110	96	4	4	114	100
3	Menanamkan kesadaran masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dalam pelestarian terumbu karang	105	92	9	8	114	100
4	Usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mengelola potensi wilayah pesisir	111	97	3	3	114	100
5	Kampanye penyelamatan terumbu karang dari kerusakannya	98	86	5	14	114	100

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari lima item pertanyaan yang diajukan pada responden ternyata menggambarkan adanya implementasi program *Coremap* II di Kabupaten Buton telah berjalan dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk lebih memberi penjelasan yang lebih kongkrit mengenai

implementasi kebijakan program *Coramep* II Kabupaten Buton maka akan dideskripsikan mengenai penjelasan table tersebut di atas:

Implementasi kebijakan *Coramep* II Kabupaten Buton mengenai kampanye penyelamatan terumbu karang dari kerusakan agar tetap dilestarikan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa *Coremap* telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam usaha menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang. Hal ini terbukti bahwa semua responden menyatakan bahwa *Coremap* telah mengkampanyekan usaha pelestarian terumbu karang kepada seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang bermukim disekitar daerah pesisir. Sementara itu pihak *Coremap* juga telah mengusahakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mengelola potensi wilayah pesisir serta aktif dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat adalah sebesar 96% atau sebanyak 110 responden. Peningkatan pengetahuan responden tersebut dapat diprediksi sebagai akibat dari gencarnya pelaksanaan kampanye yang dilakukan *Coremap* baik kampanye melalui saluran media radio lokal maupun lewat saluran komunikasi persuasi dari pihak *Coremap*.

Sementara itu responden yang mengatakan bahwa *Coremap* telah berusaha untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan menanamkan kesadaran masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dalam pelestarian terumbu karang adalah sebesar 92% atau sebanyak 105 responden. Hal ini menunjukkan bahwa imlementasi kebijakan pelaksanaan program *Coremap* telah hampir merata pada semua masyarakat, karena dari 114 responden hanya 8% atau sembilan responden yang menyatakan mereka merasa tidak atau belum pernah terberdayakan oleh *Coremap*. Hal ini dapat

diprediksi bahwa mereka yang merasa belum diberdayakan oleh *Coremap* ada kemungkinan karena ada unsur penolakan dari program kebijakan *Coremap*.

Program pemberdayaan masyarakat (*Community empowerment*) menjadi hal sangat penting untuk menjalankan kegiatan *Coremap* II. Karena kegiatan *Coremap* dirancang dan diarahkan pada pola pengelolaan sumber daya terumbu karang oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat sangat diharapkan untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan terumbu karang. Karena sumber daya karang merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat pihak *Coremap* Kabupaten Buton telah mengangkat SETO dan CF yang berperan aktif dalam memfasilitasi serta membimbing dan mengarahkan seluruh komponen *Coremap* tingkat desa. Komponen *Coremap* tingkat desa yang meliputi MD dan pengurus LPSTK, Pokmas, siswasmas serta pengurus lainnya, diharapkan memegang peranan penting dalam menjalankan dan memotivasi masyarakat desa dalam menjaga sumber daya terumbu karang. Sampai saat ini di Kabupaten Buton telah terpilih 86 MD, 43 LPSTK, 129 Pokmas serta 43 Siswasmas. Kesemuanya ini memegang peranan penting dalam menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sumberdaya terumbu karang di desa.

Seluruh komponen *Coremap* Kabupaten Buton sampai saat ini terus bekerja dengan maksimal dalam mendorong kesadaran dan pola pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan memelihara terumbu karang yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sebaran hidup terumbu karang dengan tetap menjaga agar tidak

ada upaya perusakan terhadap terumbu karang. Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat (*Community-based coral reef management*).

Pengelolaan Terumbu karang berbasis masyarakat di tingkat desa di lakukan dengan pendekatan pembentukan LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang)

Di Coremap Kabupaten Buton, tugas LPSTK antara lain sebagai berikut : (1) Menerima dan menyalurkan dana bantuan desa untuk pembangunan prasarana sosial (*village grant fund*) kepada masyarakat, (2) Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan Pokmas, (3) Membukukan penggunaan dana bantuan, (4) Membantu pembuatan RPTK terpadu, (5) Membantu mengatasi penyelesaian Pokmas bermasalah, (6) Melakukan pemeriksaan pembukuan Pokmas (mingguan, bulanan dan tahunan), (7) Berperan sebagai tim verifikasi dalam memeriksa usulan proposal Pokmas, (8) Membantu melakukan identifikasi seluruh potensi dan mengembangkan investasi usaha Pokmas, (9) Membantu menyeleksi lembaga keuangan penyalur *Seed Fund Desa* dan *Village Grant*, (10) Mengevaluasi kinerja kerja Motivator Desa dan melakukan pelaporan ke PMU, (11) Mengelola Pusat Informasi masyarakat, dan (12) Membuat pelaporan pelaksanaan RPTK kepada pemerintah desa.

Hasil monitoring dan evaluasi tentang Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) di seluruh Kecamatan menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Coremap sudah terbentuk LPSTK. Lembaga inilah yang menjadi lembaga perwakilan masyarakat dalam menentukan rencana pengelolaan terumbu karang di desa masing-masing. Melalui lembaga ini juga masing-masing desa Coremap

menyusun Peraturan Desa (Perdes) dan menetapkan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Tugas-tugas LPSTK pada masing-masing desa sudah berjalan sebagaimana disebutkan terdahulu.

Kegiatan pengembangan masyarakat di kawasan *Coremap* kabupaten Buton telah dilakukan oleh seluruh komponen Coremap Kabupaten Buton dengan beberapa pendekatan diantaranya: (1) mengarahkan dan memacu peran dan fungsi MD yang difasilitasi CF dalam mengembangkan program sosialisasi pelestarian sumber daya terumbu karang kepada masyarakat desa serta pengambilan informasi sosial budaya masyarakat desa untuk mendesain suatu kegiatan pengembangan masyarakat sesuai dengan kondisi riil masyarakat setempat; (2) mengoptimalkan penyaluran Seed Fund yang diharapkan masyarakat terbantu dalam mengembangkan usaha dan kesejahteraan hidup mereka; (3) mengoptimalkan penggunaan Village Block Grant agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa; (4) mengoptimalkan peran dan fungsi Pondok Informasi sebagai pusat informasi sumberdaya terumbu karang didesa sekaligus merupakan pusat kegiatan LPSTK dan kegiatan coremap di desa serta merupakan pusat pembelajaran masyarakat desa mengenai potensi sumberdaya terumbu karang dan (5) mengarahkan dan mengoptimalkan penyaluran dana AIG sebagai pola pengembangan mata pencaharian alternatif sehingga menurunkan usaha-usaha yang bersentuhan langsung dengan penyebab rusaknya terumbu karang.

Masyarakat diharapkan mengembangkan mata pencaharian alternative yang lebih menjanjikan ketimbang mengeksploitasi sumberdaya terumbu karang sehingga dapat menurunkan kualitas terumbu karang. Pemberian pelatihan-pelatihan langsung

kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara sumber daya terumbu karang.

Pengelolaan wilayah konservasi laut di kawasan *Coremap* kabupaten Buton dengan manggalakkan pemeliharaan Daerah perlindungan Laut sebagai suatu wilayah yang harus dilindungi dan dijaga sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di sekitarnya. Disamping itu pemeliharaan Daerah Perlindungan Laut diarahkan untuk dijaga oleh seluruh masyarakat sehingga kelestariannya dapat berlangsung. Memang tidak dapat disangkal kalau masih ada beberapa masyarakat yang melakukan upaya pencurian di lokasi DPL namun umumnya bukan berasal dari masyarakat setempat. Sebagian besar berasal dari masyarakat desa tetangga atau dari daerah lain sehingga perlunya dilakukan koordinasi tingkat Kecamatan maupun lintas Kecamatan. Selain itu Kabupaten Buton telah menetapkan Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) yang berlokasi disekitar Kecamatan Mawasangka, Kadatua, Siompu, Siompu Barat, Batauga, Sampolawa, Talaga Raya dan Batu Atas. Keseluruhan perairan diatas merupakan kawasan KKLD yang harus dijaga dan dilindungi kelesratiannya.

Kegiatan penyadaran merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan. Di Kabupaten Buton telah dilakukan beberapa upaya penyadaran masyarakat yang diharapkan adanya peningkatan kepedulian dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang. Kegiatan kegiatan yang telah, sementara dan sedang dilakukan di kawasan Penyadaran masyarakat dengan diskusi-diskusi yang dikembangkan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh MD serta pengurus *Coremap*

tingkat desa, penyuluhan secara lisan dan atau tulisan serta kampanye penyadaran masyarakat lainnya.

Program Pendidikan *Coremap* Kabupaten Buton juga telah mengembangkan proses upaya menjaga sumber daya terumbu karang melalui program mulok dan beberapa kegiatan pendidikan lainnya seperti lomba cerdas-cermat dan inovator muda bidang terumbu karang. Disamping kegiatan kependidikan yang bersifat ajakan untuk menjaga dan memelihara terumbu karang. Dalam rangka pelestarian terumbu karang *Coremap* juga telah menjalin kerja sama dengan lembaga lain yakni dengan Mitra Bahari untuk bersama menyatukan visi agar lebih ekstra dalam mengkampanyekan pentingnya pelestarian terumbu karang pada masyarakat luas.

Program Mitra Bahari bersama-sama *Coremap* Buton juga telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan potensi sumber daya terumbu karang. Baik itu yang bersifat kegiatan pengembangan sumberdaya manusia seperti beasiswa maupun kegiatan-kegiatan didesa lainnya. Koordinasi belum berjalan dengan baik.

Tabel 4.9 Tanggapan Responden tentang Implementasi Program *Coramep* yang berhubungan dengan Kampanye Kesadaran Lingkungan

No	Implementasi Kebijakan <i>Coramep</i> Tentang Kampanye kesadaran Lingkungan	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	Melaot dengan menggunakan bahan kimia beracun perbuatan melanggar hukum	102	89	9	11	114	100
2	Mengambil batu dan pasir laut secara berlebihan melanggar hukum	105	92	9	8	114	100
3	Menebang hutan bakau adalah suatu pelanggaran hukum	109	97	5	3	114	100
4	Membuang sampah di laut merupakan pelanggaran hukum	102	89	9	11	114	100

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton yang berhubungan dengan aturan/hukum bahwa melakukan kegiatan melaot dengan menggunakan bahan-bahan kimia beracun, mengambil batu karang dan pasir laut secara berlebihan, menebang hutan bakau, dan membuang sampah disekitar pesir laut adalah merupakan pelanggaran hukum menunjukkan adanya persentase yang sangat positif.

Pernyataan responden tersebut dapat dilihat pada gambaran persentase masing-masing item pertanyaan sebagai berikut: (1) responden telah memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa melakukan kegiatan melaot dengan menggunakan bahan-bahan kimia beracun adalah merupakan suatu pelanggaran aturan dan hukum negara yaitu mencapai 89% atau sebanyak 102 responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup disekitar pesisir pantai telah memiliki kesadaran untuk tidak merusak lingkungan alam kelautan secara umum. (2) responden telah memiliki

pengetahuan dan kesadaran bahwa menebang dan mengambil hutan bakau adalah merupakan suatu pelanggaran aturan dan hukum negara yaitu mencapai 92% atau sebanyak 105 responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup disekitar pesisir pantai semakin memiliki kesadaran hukum bahwa masyarakat tidak diperbolehkan mengambil dan menebang hutan bakau karena akan mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai, mengakibatkan abrasi pantai dan akan lebih merugikan kehidupan masyarakat yang bermukim disekitar pantai. (3) responden telah memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa membuang sampah disekitar pesisir laut adalah merupakan suatu pelanggaran aturan dan hukum negara yaitu mencapai 97% atau sebanyak 109 responden. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat yang hidup disekitar pesisir pantai semakin memiliki kesadaran hukum bahwa masyarakat tidak diperbolehkan membuang sampah disekitar pesisir, karena akan mengakibatkan pendangkalan pantai dan pencemaran air laut sehingga secara langsung dapat mengganggu kehidupan biota laut. (4) responden telah memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mengambil batu karang dan pasir laut adalah merupakan suatu pelanggaran aturan dan hukum negara yaitu mencapai 89% atau sebanyak 102 responden. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat yang hidup disekitar pesisir pantai masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang mengambil batu dan pasir laut.

C. Gambaran Efektifitas Kebijakan Coremap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Arah kebijakan Coremap II Kabupaten Buton telah melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam mengembangkan proses pengelolaan organisasi baik

dalam rangka pengelolaan program di lapangan terutama desa-desa yang masuk dalam wilayah binaan *Coremap* maupun dalam pengembangan kelembagaan *Coremap* itu sendiri. Arah kebijakan *Coramep* II Kabupaten Buton ditunjukkan untuk memperkuat sistem kelembagaan *Coramep* dalam menjalankan visi pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai sorotan sasaran program *Coramep*.

Dalam rangka memperkuat sistem kelembagaan tersebut maka *Coremap* membuat suatu kebijakan teknis dengan cara mengefektifkan koordinasi antara seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan program *Coramep* di lapangan dapat berjalan dengan sukses tanpa banyak mengalami hambatan. Sebagai wujud dari kebijakan tersebut maka pada Tanggal 13 Maret 2006 *Coramep* membentuk Dewan Pesisir Kabupaten Buton (CCEB) dan tanggal 16 April 2007 Dewan Pesisir Kabupaten Buton direvisi kembali, (No SK: 228 Tahun 2007).

Dewan Pesisir Kabupaten Buton (CCEB) adalah merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Bupati Kelapa Daerah Kabupaten Buton dimana anggotanya terdiri dari beberapa badan seperti Dappeda sebagai koordinator, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres, TNI Angkatan Laut, Camat, Lembaga Adat dan instansi terkait lainnya, perwakilan masyarakat, (LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Perempuan) yang direkrut secara seimbang.

Dewan Pesisir Kabupaten Buton (CCEB) memiliki tugas-tugas sebagai berikut: (1) menyusun kebijakan dan strategi di tingkat kabupaten, (2) mengkaji dan memberikan masukan rencana kerja tahunan yang disusun PMU sebelum diajukan kepada DPRD, (3) memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan *coremap*,

(4) menganalisis kemajuan yang dicapai dan opini publik tentang *Coremap*, (5) memberi masukan untuk revisi Rencana Strategis Kabupaten, (6) melaksanakan koordinasi dengan program-program sejenis, (7) memantau kemajuan pelaksanaan *coremap* di kabupaten, (8) memberikan dukungan informasi pengelolaan *coremap* kepada DPRD dan (9) menyelesaikan konflik pengelolaan perikanan.

Dalam rangka menjalankan dan mensukseskan tugasnya Dewan Pesisir mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali dan pertemuan tahunan. Dalam pertemuan rutin tersebut lebih diarahkan pada koordinasi antar pengurus Dewan Pesisir Kabupaten Buton dengan pihak *Coremap*. Sementara itu dalam pertemuan tahunan diadakan rapat koordinasi dengan menitikberatkan pada pemaparan program kerja yang telah dan akan dilakukan oleh *Coremap* Kabupaten Buton serta penelaahan kajian solusi dari semua permasalahan yang terjadi. Hasil-hasil dari pertemuan bulanan dan tahunan tersebut dijadikan sebagai bahan masukan dan saran yang penting dalam merumuskan setiap kegiatan pengembangan kerja *Coremap* II Kabupaten Buton.

Program monitoring dan evaluasi untuk *Coremap* II Kabupaten Buton dilakukan dua kali setahun yang lebih bersifat pada monitoring dan evaluasi kerja dari pelaksanaan perkembangan *Coremap* di tingkat Desa. Tim monitoring dan evaluasi *Coremap* Buton melibatkan seluruh komponen koordinator dalam lingkup kerja *Coremap* (MCS, CBM, PA, CRITC). Cakupan yang dilihat dalam monitoring dan evaluasi berdasarkan pada hal-hal yang urgen yang perlu mendapat klarifikasi yang jelas dari tingkat informasi desa.

Tahun 2007 komponen yang dilihat dalam monitoring meliputi seluruh capaian kerja LPSTK termasuk Seed fund, Village Block Grant, AIG, Pondok Informasi, DPL, Perdes, serta kerja SECO/CF dan MD di desa. Mengingat pentingnya kegiatan ini maka hasil dan masukan serta output dari tiap kunjungan merupakan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Sejak tahun 2005, 2006 dan 2007, telah dilakukan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam lingkup *Coremap* Kabupaten Buton. Beberapa pelatihan yang pernah dilakukan antara lain: (1) Penelitian dan Pemantauan Lokal (2) Pelatihan Ekologi Terumbu Karang (3) (4) Pelatihan Selam Dasar (5) Pelatihan Pengelolaan Ikan Berkelanjutan (6) Pelatihan SETO / Fasilitator (7) Pelatihan untuk Pemantauan Terumbu Karang (Siswasmas) (8) Pelatihan Investigasi Destruktif Fishing (8) Pelatihan Keuangan Mikro (9) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (10) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perdagangan Ikan Karang (12) Pelatihan Komunikasi (13) Pelatihan Jumalis.

Kegiatan pelatihan tersebut dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan *Coremap* di lapangan. Penelitian dan monitoring terumbu karang (*Coral reef research and monitoring*) adalah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mengeksplorasi data dan informasi sumber daya terumbu karang termasuk kondisi biofisik dan social budaya masyarakat setempat. Hal ini dianggap sangat penting untuk menentukan langkah dan arah strategis pengembangan sumber daya terumbu karang desa. Upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya terumbu karang tidak akan berjalan dengan baik jika tidak mempunyai data biofisik dan upaya

untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak akan efektif jika tidak mengetahui informasi dan data awal dari keadaan masyarakat pesisir.

Implementasi kebijakan *Coremap* sejak awal program telah dilakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan untuk melihat gambaran secara utuh bagaimana kondisi masyarakat pesisir termasuk budaya dan pola hidup masyarakat. Untuk mengefektifkan kegiatan-kegiatan *Coremap* di lapangan CRITC telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya implementasi dan penelitian lokal yang diarahkan pada kegiatan mengidentifikasi potensi, kondisi dan jenis-jenis terumbu karang di Kabupaten Buton. Hal ini dirasa sangat penting untuk mengetahui kondisi biofisik terumbu karang Kabupaten Buton dan termasuk menentukan langkah awal sebagai upaya mempertahankan kelestarian sumber daya terumbu karang sebesar 10%. Selain itu dilakukan juga kegiatan sosialisasi CREEL dan Lokakarya kabupaten. Namun demikian kegiatan CRITC belum sepenuhnya memberikan output yang diharapkan. Beberapa kegiatan identifikasi dan pengambilan data sosial masyarakat belum sepenuhnya terlaksana. Kegiatan ini telah di programkan tahun 2006 dan karena tidak dapat terlaksana oleh karena kendala nonteknis maka dilanjutkan ke tahun 2007. Namun demikian kegiatan ini juga tidak dapat terlaksana dan kemudian direncanakan kembali di tahun 2008.

Untuk mengetahui gambaran mengenai efektivitas kebijakan *Copremap* II dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan *Coramep* II Kabupaten Buton.

Tabel 4.10 Tanggapan Responden tentang Efektifitas *Coremap* yang berhubungan dengan Sosialisasi dan Pelatihan

No	Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i> Tentang Sosialisasi & Pelatihan	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		F	%	f	%	f	%
1	Sosialisasi program <i>Coremap</i> dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang tujuan dan fungsi <i>Coremap</i>	108	95	6	5	114	100
2	Pelatihan program <i>Coremap</i> dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir	105	92	9	8	114	100
3	Diskusi kelompok dengan <i>Coremap</i> dapat memberikan pemahaman bahwa terumbu karang harus dilestarikan oleh masyarakat pesisir sendiri	105	92	9	8	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton yang telah dilakukan pada berbagai sektor akan diukur melalui efektifitas program tersebut pada hasil yang telah dicapai. Gambaran efektifitas kebijakan *Coramap* dapat dilihat pada hasil sebaran kuisioner yang telah dilakukan untuk mengukur apakah kebijakan *coramep* efektif atau tidak dalam capaian sasaran program yang telah dijalankan di lapangan. Jika dilihat hasil frekuensi dan persentase dari jawaban yang diberikan responden ternyata kebijakan *Coramep* telah menunjukkan hasil yang positif.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan *Coramep* yang berhubungan dengan sosialisasi program dan pelatihan mengenai pelestarian terumbu karang dan atau untuk mempertahankan kelestarian terumbu karang dari rusaknya ternyata sangat efektif untuk menyebarkan tujuan dan fungsi program *Coremap* yang sesungguhnya pada masyarakat pesisir. Sosialisasi program *Coremap*

adalah memperkenalkan pada masyarakat tentang dampak dari kerusakan terumbu karang bagi masyarakat dan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelestarian terumbu karang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Dari sebaran kuisioner diperoleh hasil bahwa sebesar 95% atau sebanyak 108 responden menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi kebijakan *Coremap* masyarakat dapat mengetahui tujuan dan fungsi *Coremap* yang sesungguhnya bagi masyarakat pesisir yakni usaha melestarikan terumbu karang dari kerusakannya. Usaha pelestarian terumbu karang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan cara memberikan modal usaha melalui usulan program block grant, seed fund dan AiG (*Alternatif Income Generating*). Bantuan modal usaha yang diberikan diharapkan dapat membantu penguatan usaha masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan masyarakat dari pemberian modal usaha dari *Coremap* akan turut berdampak pada usaha pelestarian terumbu karang karena masyarakat telah memiliki usaha alternatif dan tidak sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada kegiatan melaut.

Efektifitas sosialisasi program *Coremap* karena ditunjang adanya strategi yang dilakukan *Coremap* yakni dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran kepada masyarakat yakni melalui diskusi kelompok dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan dan usaha pelestarian terumbu karang. Hal ini berimplikasi pada bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan terumbu karang dan menjaga kelangsungan hidup terumbu karang.

Efektifitas sosialisasi program *Coremap* jika dikaitkan dengan pandangan

Purwanto (2006) menyebutkan ada empat faktor utama yang mempengaruhi efektifitas diantaranya adalah struktur, strategi, teknologi dan lingkungan. Keempat faktor tersebut saling mengkait dan mempengaruhi efektifitas organisasi. Menurut pendekatan *kontingensi* komponen penentu organisasi adalah lingkungan. Keadaan lingkungan akan mempengaruhi para manajer dalam menyusun strategi organisasi. Strategi organisasi menentukan pilihan desain struktur dan teknologi organisasi yang dipilihnya. Disamping itu teknologi organisasi juga akan mempengaruhi pilihan desain struktur dan kultur organisasi.

Starategi yang dilakukan *Coremap* dalam rangka menyelamatkan terumbu karang dari kerusakannya yang turut melibatkan masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan dan intensitas berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan upaya-upaya penyelamatan terumbu karang telah berdampak positif pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari program *Coremap*. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan pandangan Gibson dkk (1985) yang menyatakan efektifitas adalah penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin lebih efektif kita menilai mereka . Efektifitas diukur dari tiga tingkatan analisis organisasi yaitu:

(1)Efektifitas individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi dan stress, (2) efektifitas kelompok yang dipengaruhi oleh kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peranan dan norma. (3) efektifitas pada level organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, pilihan stategis, struktur, proses dan budaya.

Ada tiga pendekatan untuk mengukur efektifitas suatu organisasi yaitu:

(2) Pendekatan pencapaian tujuan mengukur kemampuan organisasi dalam

mencapai tujuan. Jika organisasi mampu mencapai tujuan maka organisasi tersebut efektif, (2) pendekatan sistem mengukur bagaimana organisasi memperoleh input dan berproses, namun tanpa menaruh perhatian yang cukup terhadap pencapaian tujuan dan (3) pendekatan konstituensi strategis memandang jika konstituens puas terhadap kinerja organisasi maka organisasi tersebut adalah efektif.

Jones dalam Purwanto (2006) mempertegas pandangan Purwanto dan Gibson yang menyatakan bahwa perfektiv berbeda dalam mengukur efektifitas yaitu pendekatan sumber eksternal, pendekatan sistem internal dan pendekatan teknis. Dari pandangan Purwanto dan Gibson tersebut jika dikaitkan dengan efektifitas sosialisasi kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton adalah cukup relevan karena *Coremap* sebagai lembaga atau organisasi yang bergerak pada usaha pelestarian terumbu karang telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Jika dianalisis secara mendalam persentase atas jawaban-jawaban yang diberikan responden tersebut di atas dapat memberi gambaran bahwa dengan adanya sosialisasi yang gencar dilakukan *Coremap* ternyata masyarakat dapat mengetahui tujuan inti dari *Coremap*. Jika dihubungkan dengan pendekatan paradigma pemikiran Difusi Inovasi maka sangat relevan dengan yang dijalankan pihak *Coremap* dalam mendifusikan inovasi-inovasi baru yang ditujukan ke sasaran program *Coremap*.

Realitas efektifitas kebijakan *Coremap* dalam mensosialisasikan programnya telah berhasil mendifusikan ide-ide dan gagasan mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang. Hal ini sesuai dengan pandangan Everett M. Rogers dalam (Effendi 2000:283) mengenai sosialisasi program *Coremap* adalah untuk menkomunikasikan kepada masyarakat mengenai ide tentang pelestarian terumbu karang. Rogers menyatakan bahwa untuk mempengaruhi masyarakat maka dilakukan proses

pendifusian ide-ide tertentu kepada masyarakat melalui proses pengkomunikasian kepada khalayak sasaran. Rogers menyatakan bahwa Difusi adalah sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*). Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan/ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana para pelakunya menciptakan informasi dan saling pertukaran informasi tersebut untuk mencapai pengertian bersama. Di dalam isi pesan itu terdapat keternasaan (*newness*) yang memberikan kepada difusi ciri khusus yang menyangkut ketidakpastian (*uncertainty*).

Sementara itu terdapat enam responden atau 5% yang menyatakan bahwa sosialisasi program *Coremap* tidak memberikan kontribusi dalam menyebarluaskan tujuan dan fungsi-fungsi *Coremap* ke masyarakat. Hal ini menunjukkan ternyata masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan dan fungsi program *Coremap*. meningkatkan produksi secara berkelanjutan selama adanya penerapan kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton.

Selanjutnya item pertanyaan kuisisioner apakah pelatihan-pelatihan yang dilakukan *Coremap* dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir. Dari jawaban responden kontribusinya adalah sebesar 92% atau sebanyak 105 responden dan hanya 8% responden atau sebanyak sembilan responden tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pihak *Coremap*. Dari gambaran atas jawaban responden tersebut

di atas menunjukkan bahwa ternyata pelatihan yang dilakukan pihak *Coremap* adalah sangat efektif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat pesisir sebagai sasaran program *Coremap* terkait dengan usaha pelestarian terumbu karang dari kerusakan. Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan paradigma Difusi bahwa dalam mendifusikan suatu inovasi tertentu kesuatu sistem sosial kadang-kadang terdapat beberapa orang yang lambat dalam menerima inovasi yang dilancarkan oleh pihak inovator. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya *Coremap* telah sukses secara kongrit dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir namun masih terdapat beberapa dari masyarakat sasaran program yang masih lambat dalam menerima inovasi-inovasi yang dilancarkan oleh *Coremap*.

Selain kegiatan sosialisasi yang diikuti dengan pemberian pendidikan dan pelatihan juga dilakukan dengan diskusi-diskusi kelompok kecil antara masyarakat dengan *Coremap* guna memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap melindungi pelestarian terumbu karang dan pelestarian terumbu karang adalah harus dilestarikan oleh masyarakat pesisir sendiri. Dari diskusi yang dilakukan antara pihak *Coreamp* dan masyarakat ternyata dari sebaran kuesioner diperoleh hasil sebesar 92% atau sebanyak 105 responden dan hanya lima orang responden yang menyatakan tidak. Diskusi kelompok dengan *Coremap* dapat memberikan pemahaman bahwa terumbu karang harus dilestarikan oleh masyarakat pesisir sendiri.

Tabel 4.11 Tanggapan Responden tentang Efektifitas *Coremap* yang berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat

No	Efektifitas <i>Coremap</i> Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan tentang	Tanggapan Responden					
			Ya		Tidak		Jumlah	
			F	%	f	%	f	%
1	Mensejahterakan masyarakat		106	93	7	8	114	100
2	Memperkuat modal usaha masyarakat			88	12	14	114	100
3	Meningkatkan produksi berkelanjutan		100					
			108	95	5	6	114	100

Sumber: data penelitian (diolah 2009)

Implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton yang telah dilakukan pada berbagai sektor akan diukur melalui efektifitas program tersebut pada hasil yang telah dicapai. Gambaran efektifitas kebijakan *Coramep* dapat dilihat pada hasil sebaran kuisioner yang telah dilakukan adalah untuk mengukur apakah kebijakan *coramep* sudah efektif atau tidak dalam capaian sasaran program yang telah dijalankan di lapangan. Jika dilihat hasil frekuensi dan persentase dari jawaban yang diberikan responden ternyata kebijakan *Coramep* telah efektif.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan *Coramep* ternyata sangat efektif untuk meningkatkan produksi berkelanjutan masyarakat pesisir. Dari sebaran kuisioner diperoleh hasil bahwa sebesar 93% atau sebanyak 106 responden menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan *Coremap* masyarakat dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan setelah adanya penerapan kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton. Jika dianalisis secara mendalam persentase atas jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa ternyata kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi

peningkatan pendapatan para nelayan, yang selanjutnya akan lebih cenderung mengarah kearah yang lebih positif dimasa-masa yang akan datang. Hal ini didukung pula dengan kenyataan di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti, ternyata kondisi penghasilan masyarakat pesisir sebelum dan setelah adanya program *Coremap* telah berdampak pada semakin membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah binaan *Coramep*.

Kebijakan *Coramep* dianggap sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan dan produktifitas masyarakat pesisir karena *Coremap* secara teknis telah melakukan berbagai bentuk program kegiatan untuk mendukung keberhasilan program yang dijalankan. Program-program tersebut diantaranya adalah: (1) pelatihan selam dasar dan SAR, (2) pelatihan pemantauan terumbu karang dan ikan, (3) pelatihan BME, Sosek dan Ekologi, (4) pelatihan pengelolaan perikanan berkelanjutan, (5) pelatihan daeh perlindungan laut, (6) pelatihan budidaya laut, (7) pelatihan teknis dan manajemen usaha perikanan, (8) Training Village Financial Managent (9) pelatihan pengembangan usaha perikanan, (11) pelatihan investigasi penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, (12) lokakarya strategi penyadaran masyarakat, (13) Workshop guru untuk mengembangkan muatan lokal, (14) Pelatihan CREEL dan (15) Pelatihan Wanita Nelayan.

Kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut di atas telah berdampak pada penambahan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir binaan *Coremap*. Jika dihubungkan dengan pernyataan responden tentang bagaimana efektifitas kebijakan *Coremap* dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pesisir dapat disimpulkan bahwa hal tersebut cukup logis jika masyarakat binaan *Coremap* dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir karena program *Coremap* telah melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dengan membekali pengetahuan dan keterampilan dasar kepada masyarakat sasaran program *Coramep*.

Sementara itu responden yang menyatakan bahwa kebijakan program *Coramep* dapat memperkuat modal usaha masyarakat menunjukkan sebesar 88% atau sebanyak 100 responden. Hal ini memberi gambaran bahwa terdapat hubungan antara produktifitas masyarakat yang tinggi dengan kekuatan modal yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat modal masyarakat, *Coremap* telah memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha produktif masyarakat untuk setiap kelompok usaha binaan *Coremap*.

Salah satu bentuk bantuan *Coremap* untuk mendukung aktifitas masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan rehabilitasi terumbu karang dan usaha ekonomi produktif adalah dana bantuan MPA Kabupaten. Untuk memanfaatkan dana bantuan tersebut akan dilewati dua tahapan, yaitu pertama penyaluran dana bantuan MPA Kabupaten dari *Coremap* ke lembaga keuangan mikro yang direkomendasi oleh tenaga ahli keuangan mikro (*micro finance consultant*) yang tertuang dalam disain pengelolaan dana bantuan MPA Kabupaten, kedua penyaluran dana dari lembaga keuangan ke pelaku usaha yang telah mengajukan usulan dan telah mendapat rekomendasi dari PMU. Hingga akhir Desember 2008, dana Seed Fan yang tersalurkan dimasyarakat mencapai Rp. 2.150.000.000,- sedangkan dana AIG yang juga sudah tersalurkan disalurkan sejumlah Rp. 892.485.000,-. Keseluruhan dana tersebut tersalurkan di 14 kecamatan lokasi Program *Coremap*.

Village Grant adalah Dana bantuan desa yang merupakan dana bantuan hibah yang disediakan oleh coremap untuk mendukung pembiayaan kegiatan pengelolaan terumbu karang dan pembangunan prasarana dasar desa. Dana bantuan desa adalah dana habis (hibah) yang akan dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). Pengelolaan penggunaan dana ini terintegrasi dalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) yang dihasilkan. Dana bantuan desa yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana desa, diharapkan terdapat kontribusi dari masyarakat. Bentuk kontribusi masyarakat sebesar 30% ini dapat berupa tenaga kerja, barang, uang tunai atau kombinasi dari ketiganya. Semua aktivitas terkait dengan Dana bantuan desa ini harus mengikuti strategi yang terdapat dalam kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disetujui oleh pemerintah daerah setempat.

Dana Bantuan MPA Kabupaten atau *AIG (alternative income generating District Fund)* adalah dana pinjaman yang disediakan oleh Coremap untuk mendorong peningkatan usaha-usaha ekonomi di lokasi program. Secara spesifik *AIG District Fund* ini untuk membiayai usaha-usaha ekonomi skala kecil dan menengah yang mendukung pengembangan ekonomi di tingkat desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi Coremap yang dapat menurunkan tekanan terhadap sumberdaya laut khususnya terumbu karang, yang mana setelah program berakhir dana bantuan MPA ini tetap dapat diakses oleh masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Adapun pemanfaat dari dana bantuan ini adalah pelaku-pelaku usaha yang sifat jenis usahanya tidak bertentangan dengan kegiatan perlindungan sumberdaya alam.

Dengan adanya bantuan-bantuan diatas yang langsung kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi modal yang dapat di pakai sebagai modal usaha dan juga dapat menjadi sarana pendukung dalam melaksanakan aktifitas keseharian mereka sehingga dapat melancarkan perekonomian dalam masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan suatu penelitian dengan melakukan wawancara dan juga pengisian kuisioner oleh masyarakat sehingga dapat diketahui sejauh mana efektifitas program *Coremap* ini dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.12 Tanggapan Responden tentang Efektifitas Kebijakan *Coremap* dengan Sikap Masyarakat pada Lingkungan Pesisir

No	Efektifitas Kebijakan <i>Coramep</i> tentang Sikap pada Lingkungan	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	F	%	f	%
1	Mulai sadar mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang	104	91	10	9	114	100
2	Mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan bahan kimia beracun dalam kegiatan melaut	114	100	0	0	114	100
3	Mulai mau berpartisipasi dalam melestarikan terumbu karang	105	92	9	8	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program *Coramep* II Kabupaten Buton telah efektif dalam memberikan pemahaman sehingga mereka memiliki kesadaran mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang yaitu sebesar 91% atau sebanyak 104 responden. Sementara yang tidak atau belum memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang adalah 7% atau sebanyak delapan responden.

Sehubungan dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang maka diikuti pula dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan alam kelautan secara umum, misalnya mereka mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan bahan kimia beracun dan jenis bahan peledak lainnya dalam kegiatan melaut. Hal ini terbukti bahwa dari sebaran kuisioner pada 114 responden ternyata sebesar 100% atau semua responden mengatakan bahwa mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan bahan kimia beracun dalam kegiatan melaut.

Gambaran kesadaran masyarakat yang telah meninggalkan kebiasaan menggunakan peledak dan bahan-bahan kimia beracun lainnya dalam kegiatan melaut belum bisa diambil suatu kesimpulan bahwa mereka telah secara sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan tersebut karena kendatipun mereka mengatakan tidak atau telah memiliki kesadaran untuk hal tersebut, namun masih ada kemungkinan diantara mereka masih ada yang belum memiliki kesadaran untuk hal tersebut.

Selanjutnya responden yang mulai mau berpartisipasi dalam melestarikan terumbu karang adalah sebesar 92% atau sebanyak 105 responden. Dari gambaran pernyataan responden tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dengan adanya implementasi kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton terutama yang masuk dalam wilayah-wilayah binaan *Coremap* telah menunjukkan adanya kesadaran masyarakat pesisir untuk mau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pelestarian lingkungan alam kelautan secara umum dan pelestarian terumbu karang pada khususnya yang merupakan visi utama dari kebijakan program *Coremap*.

Dengan demikian untuk melihat apakah kebijakan *Coremap* dalam rangka mencapai visi menyelamatkan terumbu karang dari kerusakannya adalah dinggap sangat efektif.

Gambaran efektifitas kebijakan *Coramep* tentang sikap masyarakat pesisir terhadap usaha pelestarian lingkungan pesisir dapat dilihat dengan semakin menurunnya angka temuan kasus penggunaan bahan peledak dan bahan-bahan kimia beracun lainnya dalam kegiatan melaut. Data kasus temuan penggunaan bahan peledak dan bahan-bahan kimia beracun lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Data kasus temuan penggunaan bahan peledak oleh para nelayan tahun 2006-2008 di wilayah binaan *coremap*

No	Tahun	Kec. Wabula	Kec. Kadatua	Kec. Mawasangka
1	2005	18	20	19
2	2006	16	12	6
3	2007	8	3	1
4	2008	1	1	2

Sumber : Kantor Kecamatan (diolah)

Tabel tersebut di atas secara umum menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak di tiga kecamatan wilayah binaan *coremap* yakni Kecamatan Wabula, Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Mawasangka menggambarkan adanya penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Temuan kasus penggunaan bahan peledak oleh para nelayan di wilayah binaan *coremap* mulai terjadi penurunan yang sangat menyolok pada tahun 2008, dimana di Kecamatan Wabula dan Kecamatan Kadatua hanya terdapat satu kasus temuan penggunaan bahan peledak dan terdapat dua kasus di Kecamatan Mawasangka. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan antara implementasi program *coremap* dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pesisir.

Tabel 4.14 Tanggapan Responden tentang Efektifitas Kebijakan *Coremap* dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

No	Efektifitas Kebijakan <i>Coramep</i> dalam meningkatkan taraf Hidup masyarakat	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		F	%	f	%	f	%
1	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Pesisir karena adanya <i>Coremap</i>	106	93	8	7	114	100
2	Puas dengan kegiatan yang dilakukan <i>Coremap</i>	105	92	9	8	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Jika melihat gambaran tabel tersebut di atas dapat memberi kesan bahwa implementasi kebijakan *Coramep* II Kabupaten Buton dianggap efektif karena ternyata sebagian besar terpenuhinya kebutuhan responden atau kebutuhan masyarakat pesisir di wilayah binaan *Coremap* ditunjang oleh adanya implementasi kebijakan *Coremap*. Hal ini terbukti dari sebaran kuisisioner yang disebar kepada 120 responden ternyata sebesar 93% atau sebanyak 106 responden menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan responden karena disebabkan oleh adanya kebijakan *Coremap*. Pernyataan tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan responden bahwa masyarakat merasa puas dengan masuknya kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton. Hal ini terlihat dari jawaban responden bahwa sebesar 92% atau sebanyak 105 responden merasa puas dengan masuknya kebijakan *Coremap*.

Tabel 4.15 Efektifitas Pelaksanaan Program *Coramep* yang berhubungan dengan Pendapatan Masyarakat

No	Efektifitas Kebijakan <i>Coramep</i> yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan	Tanggapan Responden					
		Ya		Tidak		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1	Meningkatkan produksi nelayan	95	83	19	17	114	100
2	Menguntungkan masyarakat pesisir	95	83	19	17	114	100
3	Pendapatan masyarakat biasa-biasa saja	20	16	94	84	114	100
4	Membuat pendapat masyarakat tidak menentu	6	5	106	95	114	100
5	Hanya merugikan masyarakat	4	4	111	96	114	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah, 2009)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa efektifitas implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton pada bidang ekonomi terutama yang berhubungan dengan item pertanyaan bahwa kebijakan program *Coramep* dapat meningkatkan produksi nelayan dan menguntungkan nelayan adalah masing-masing sebesar 83% atau sebanyak 95 responden dan masing-masing 19 responden yang menyatakan bahwa program *Coramep* tidak meningkatkan produksi dan menguntungkan para nelayan.

Jika dianalisis secara mendalam persentase atas jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa ternyata kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi peningkatan pendapatan para nelayan, yang selanjutnya akan lebih cenderung mengarah pada kondisi yang lebih positif dimasa-masa yang akan datang. Hal ini didukung pula dengan kenyataan di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti, ternyata kondisi penghasilan mereka sebelum dan setelah adanya program *Coremap* telah berdampak pada semakin membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di

wilayah binaan *Coramep*. Pernyataan tersebut didukung pula dengan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa :

“Masuknya program *Coremap* di Kabupaten Buton telah meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Program *Coremap* itu telah banyak membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat misalnya dengan memberikan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha-usaha ekonomi produktif yang ada di desa. Masyarakat disuruh membentuk kelompok-kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan kelompok usaha. Kelompok-kelompok usaha yang telah terbentuk kemudian diberikan bantuan modal usaha” (wawancara Januari 2009)

Sementara itu responden yang menyatakan bahwa kebijakan program *Coramep* tidak berdampak positif atau biasa-biasa saja adalah sebesar 16% atau sebanyak 20 responden, dan yang menyatakan berdampak positif atau ada pengaruh positif adalah sebesar 84% atau sebanyak 94 responden. Terdapat enam responden yang memberikan jawaban secara ekstrim terhadap implementasi program *Coramep* yang menyatakan bahwa program *Coramep* tidak menguntungkan atau bahkan hanya merugikan masyarakat adalah sebesar 4% dan terdapat tiga responden yang menyatakan bahwa program *Coramep* mengakibatkan hasil dan pendapatan masyarakat pesisir tidak menentu yaitu sebesar 6%. Pernyataan responden tersebut dapat diprediksikan bahwa mereka adalah oknum-oknum yang kurang mendukung dengan adanya program *Coramep*, sehingga apapun nilai positif yang telah dilakukan program *Cormep* mereka menilai justru tidak punya kontribusi dalam memberdayakan masyarakat pesisir menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha produktif berdasarkan sumber-sumber lokal yang ada di desanya.

Tanggapan responden tersebut diatas menggambarkan bahwa ternyata kebijakan *Coremap* sebagian dari masyarakat menganggap bahwa *Coremap* kurang memberikan kontribusi apa-apa terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir. Responden yang menanggapi *Coremap* tidak memberikan kontribusi positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat adalah mereka yang kurang mendukung dengan adanya program *Coremap*. Jika dihubungkan dengan paradigma teori Difusi inovasi adalah cukup relevan untuk kasus tersebut diatas, karena menurut paradigma berfikir teori difusi inovasi mengatakan bahwa dalam suatu sistem sosial yang dilancarkan suatu difusi melalui saluran komunikasi tertentu ternyata tidak semua masyarakat dapat menerima ide dan gagasan-gagasan baru itu dalam waktu yang bersamaan. Artinya adalah ada saja masyarakat yang memiliki kelambanan dalam menerima proses perubahan sosialnya. (Rogers dalam Effendi, 285:2000)

Responden yang menganggap bahwa *Coremap* tidak atau belum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dapat diprediksi bahwa mereka sudah mengetahui tentang berbagai hal mengenai kebijakan *Coremap* namun mereka masih menerima secara pasif dan kurang memberikan apresiasi pada program *Coremap*. Menurut paradigma teori Difusi Inovasi ada kemungkinan pada waktu yang akan datang mereka akan terpengaruh dengan program *Coremap* setelah melalui proses yang cukup panjang.

Pembahasan mengenai gambaran efektifitas kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton seperti yang telah dideskripsikan tersebut di atas secara nyata telah memberikan petunjuk bahwa *Coremap* ternyata sangat efektif untuk proses memberdayakan masyarakat pesisir. Untuk lebih mempertegas gambaran efektifitas

implementasi kebijakan *Coremap* tersebut di atas berikut ini akan di tampilkan pula beberapa tanggapan responden mengenai hal-hal sebagai berikut:

Tabel 4.16 Tanggapan Responden tentang Hasil Tangkapan Ikan Nelayan setelah adanya Pelaksanaan Kebijakan *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	36	32
Meningkat	62	54
Kurang Meningkatkan	7	6
Tidak Meningkatkan	9	8
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Tabel di atas menunjukkan bahwa semenjak masuknya program *Coremap* II jumlah tangkapan ikan masyarakat terjadi peningkatan dibandingkan sebelum masuknya program tersebut. Hal ini dibuktikan dengan data dari sebaran kuisioner sebesar 32% atau sebanyak 36 responden yang menyatakan tangkapan ikan nelayan sangat meningkat setelah adanya program *Coremap*. Sedangkan sebesar 54% atau sebanyak 62 responden menyatakan jumlah tangkapan ikan meningkat. Sementara itu yang memberikan tanggapan bahwa hasil tangkapan ikan nelayan kurang meningkat adalah sebesar 6% atau sebanyak tujuh responden dan yang menyatakan hasil tangkapan ikan nelayan selama adanya *Coremap* justru tidak mengalami peningkatan adalah sebesar 8% atau sembilan responden

Peningkatan jumlah tangkapan ikan nelayan di wilayah tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan di wilayah *Coremap*. Mereka mengatakan bahwa semenjak adanya program *Coremap* jumlah tangkapan mereka sangat meningkat terutama ikan-ikan karang. Hal ini diprediksi karena sebagai akibat

dari munculnya kesadaran masyarakat dalam memelihara terumbu karang dan mulai terjagannya daerah perlindungan laut (DPL) yang dibuat oleh *Coremap*. Pernyataan tersebut cukup beralasan karena didukung dengan data tentang jumlah tangkapan ikan nelayan dalam tiga tahun terakhir pada tiga daerah kecamatan binaan *coremap*. Data mengenai hasil tangkapan ikan nelayan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Perkembangan hasil tangkapan ikan oleh nelayan di wilayah binaan *Coremap*

No	Tahun	Kec. Wabula	Kec. Kadatua	Kec. Mawasangka
1	2006	58	65	56
2	2007	87	90	97
3	2008	136	143	131
4	Jumlah	281	298	284

Sumber : Kecamatan dalam angka di tiga Kecamatan (dimodifikasi)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 yaitu sejak dimulainya program *coremap* di Kabupaten Buton jumlah tangkapan ikan oleh para nelayan cenderung terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tangkapan ikan oleh para nelayan yang tersebar pada tiga wilayah kecamatan binaan *coremap* tersebut adalah merupakan hasil implementasi kebijakan *coremap* dan partisipasi masyarakat di wilayah binaan *coremap* melalui program daerah perlindungan laut (DPL). Peningkatan jumlah tangkapan ikan oleh para nelayan di wilayah binaan *coremap* disebabkan oleh mulai munculnya kesadaran masyarakat dalam melindungi daerah pesisir dari kerusakan akibat ulah para nelayan yang sering menggunakan bahan-bahan kimia beracun dalam kegiatan melaut.

Daerah perlindungan laut (DPL) adalah daerah/kawasan pesisir yang di batasi dan di dalam wilayah ini tidak boleh dilakukan aktifitas perikanan ataupun

penangkapan. Daerah tersebut harus dijaga sehingga terumbu karang yang ada di dalamnya akan terjaga dan terpelihara karena merupakan rumah ikan sebagai tempat bertelur dan berkembang biak. Sehingga dengan terpeliharanya DPL tersebut maka ikan-ikan akan bertambah banyak. DPL ini dibuat di masing-masing desa wilayah *Coremap*.

Tabel 4.18 Tanggapan Responden tentang hasil tangkapan ikan setelah menerapkan proses penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan memelihara terumbu karang

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	60	53
Meningkat	43	38
Kurang Meningkat	10	8
Tidak Meningkat	1	1
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Dari data di atas dapat disimpulkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan dalam memelihara terumbu karang. Hal ini dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden adalah sebesar 53% atau sebanyak 60 responden menyatakan hasil tangkapan ikan adalah sangat meningkat. Dan selanjutnya yang menyatakan meningkat adalah sebesar 38% atau sebanyak 43 responden. Kendatipun demikian masih ada responden yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan masih kurang meningkat yaitu sebesar 8% atau sebanyak 10 responden dan sebesar 1% atau sebanyak satu responden yang menyatakan hasil tangkapan ikan tidak meningkat, walaupun telah ada kesadaran terhadap lingkungan terumbu karang dan lingkungan alam kelautan pada umumnya.

Kondisi hasil tangkapan ikan yang semakin membaik dalam kegiatan melaut tersebut diprediksi sebagai akibat dari adanya mulai munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam kelautan pada umumnya dan pemeliharaan terumbu karang pada khususnya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa sejak adanya *Coremap* tersebut masyarakat sudah sadar untuk melakukan aktifitas perikanan yang tidak merusak terumbu karang. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan dibuatnya peraturan desa terumbu karang ditiap wilayah *Coremap*. Perdes tersebut dibuat, disepakati dan dijalankan oleh masyarakat setempat dan apabila ada masyarakat yang melanggar maka akan diberikan sanksi oleh masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu program *Coremap* telah banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat seperti pelatihan-pelatihan, pembuatan liflet, pembuatan buku-buku SD dan SMP tentang terumbu karang, dimana buku tersebut dimasukan didalam kurikulum SD dan SMP sebagai mata pelajaran muatan lokal. Untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang maka diadakan Radio FM yang lebih terfokus pada kampanye mengenai penyadaran terhadap masyarakat akan penting pelestarian terumbu karang. Untuk lebih menyebarluaskan informasi mengenai terumbu karang maka dilakukan pembuatan pondok informasi ditiap-tiap wilayah *Coremap* sehingga berita-berita ataupun informasi tentang *Coremap* dapat dilihat di pondok informasi tersebut. Selain itu diadakan pula *even Coremap Cup* berupa pertandingan sepak bola antar wilayah-wilayah *Coremap* sehingga dengan penggalangan kegiatan tersebut diselipkan pesan-pesan pemeliharaan dan

pengelolaan terumbu karang yang kesemuanya itu diharapkan dapat mendukung penyadaran masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang.

Tabel 4.19 Tanggapan Responden tentang Pengetahuan/Keterampilan pengelolaan wilayah pesisir setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	23	20
Meningkat	66	58
Kurang Meningkat	25	22
Tidak Meningkat	0	0
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sejak adanya program *Coremap* terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan terumbu karang, ini dibuktikan dengan persentase jawaban responden di wilayah *Coremap*, dimana 20% dan 58% menyatakan sangat meningkat dan meningkat, yang walaupun ada juga masyarakat yaitu sekitar 26% menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat kurang meningkat.

Seperti dijelaskan di atas bahwa kegiatan program *Coremap* ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelatihan-pelatihan pengelolaan terumbu karang dan pelatihan-pelatihan mata pencaharian alternatif dalam mengembangkan sumberdaya perikanan. Pernyataan tersebut di atas dipertegas dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh masyarakat nelayan di wilayah binaan *coremap* yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.20 Pengetahuan/Keterampilan Masyarakat Binaan *Coremap* dalam pengelolaan wilayah pesisir

No	Jenis Kelamin	Jenis pengetahuan/Keterampilan
1	Laki-laki	1. Mengetahui dampak penggunaan bahan peledak dan kimia beracun dalam kegiatan melaut 2. memiliki pengetahuan selam dasar untuk memantau kondisi terumbu karang 3. Memiliki pengetahuan dalam mengamati kondisi terumbu karang dan ikan 4. memiliki pengetahuan dalam mengelola perikanan yang berkelanjutan 5. Memiliki pengetahuan teknis dan manajemen usaha perikanan 6. Mengetahui dan terampil cara-cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan 7. Memiliki pengetahuan dan terampil tentang usaha pengelolaan perikanan tangkap 8. Memiliki pengetahuan baru tentang usaha pemanfaatan ikan karang 9. Memiliki pengetahuan baru dan terampil memanfaatkan alat tangkap ikan yang dibuat sendiri 10. Memiliki pengetahuan cara-cara baru membudidayakan rumput laut
2	Perempuan	1. Mengetahui cara-cara membuat abon ikan 2. Mengetahui cara-cara membuat dodol dari rumput laut 3. Mengetahui cara-cara mengeringkan rumput laut dengan menggunakan oven 4. Mengetahui cara-cara membuat berbagai jenis kue dari rumput laut

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa masyarakat pesisir binaan *coremap* dalam dua tahun terakhir telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam usaha mengelola sumber-sumber ekonomi produktif yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir di wilayah binaan *coremap* merupakan implementasi dari kebijakan *coremap*

yang diarahkan untuk memberdayakan seluruh masyarakat pesisir agar memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi dan usaha pelestarian lingkungan alam pesisir.

Implementasi kebijakan *coremap* dianggap telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat pesisir, karena selain masyarakat telah mampu melakukan berbagai usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka juga cenderung telah memiliki kesadaran untuk terlibat secara langsung dalam usaha pelestarian lingkungan alam pesisir dari kerusakannya.

Tabel 4.21 Tanggapan Responden tentang modal usaha masyarakat pesisir setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	46	40
Meningkat	55	48
Kurang Meningkat	11	10
Tidak Meningkat	2	2
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masuknya program *Coremap* II dengan adanya bantuan dana berupa dana Seedfan dan AIG maka dapat membantu permodalan masyarakat pesisir utamanya masyarakat lokasi program *Coremap*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian, dimana dari 114 responden terdapat 46 responden atau 40% menyatakan bahwa *Coremap* sangat meningkatkan permodalan masyarakat, dan 48% menyatakan permodalan masyarakat meningkat, sedang ada 11 responden atau sebesar 10% menyatakan bahwa permodalan

masyarakat kurang meningkat, dan sebesar 2% atau sebanyak dua responden justru dengan adanya *Coremap* tidak dapat meningkatkan modal usaha masyarakat.

Masih adanya masyarakat yang beranggapan tidak adanya pengaruh program *Coremap* terhadap peningkatan permodalan masyarakat ini diprediksi diakibatkan karena masyarakat tersebut tidak mengetahui atau masyarakat belum pernah menerima bantuan modal usaha dari *Coremap*. *Seed fund* adalah bantuan modal bagi masyarakat atau kelompok masyarakat guna pengembangan masyarakat pesisir melalui pemberian dana bergulir. Sampai akhir tahun 2008 sudah Rp 2.250.000,- dan sekitar 1.274 orang penerima manfaat dana tersebut. Sedangkan Dana AIG adalah Dana bantuan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kelompok usaha, jadi dana ini diberikan kepada masyarakat yang sudah benar-benar memiliki kelompok usaha sebagai modal untuk pengembangan usahanya. Dana ini baru tersalurkan di masyarakat pada tahun 2008, pemberian dana tersebut oleh pihak *Coremap* tidak terbatas jumlahnya. Selama jumlah permintaan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut. Namun kelayakan kelompok yang diberi pinjaman tetap mengacu pada petunjuk teknis pemberian dana tersebut.

Kedua bantuan tersebut di atas sangat membantu masyarakat dalam proses perbaikan taraf hidup masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima program yang walaupun kenaikannya belum secara signifikan. Mengenai besarnya bantuan modal usaha masyarakat yang dilakukan oleh *Coremap* dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.22 Tanggapan Responden tentang tingkat pemenuhan kebutuhan sandang-pangan masyarakat setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	35	31
Meningkat	55	48
Kurang Meningkat	20	18
Tidak Meningkat	4	3
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa efektivitas implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton terutama yang berhubungan dengan item pertanyaan bahwa kebijakan program *Coramep* dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang pangan adalah sebesar 48% atau sebanyak 55 responden dan yang menyatakan bahwa dengan adanya program *Coremap* pemenuhan kebutuhan sandang pangan sangat meningkat adalah sebesar 31% atau sebanyak 35 responden. Sementara yang menyatakan bahwa kendatipun telah ada program *Coremap* pemenuhan kebutuhan sandang pangan masyarakat masih kurang meningkat yaitu sebesar 18% atau sebanyak 20 responden dan yang menyatakan tidak meningkat adalah sebesar 3% atau sebanyak empat responden. Jika dianalisis secara mendalam persentase atas jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa ternyata kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang pangan masyarakat di wilayah binaan *Coremap*. Terpenuhinya kebutuhan sandang pangan masyarakat di wilayah binaan *Coremap* ternyata telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan lebih mengarah kepada kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini didukung

pula dengan kenyataan di lapangan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ternyata kondisi tersebut di atas telah berdampak pada mulai terpenuhinya kebutuhan gizi dan kalori yang cukup bagi keluarga di wilayah binaan *Coremap*.

Kondisi kehidupan masyarakat di wilayah binaan *Coremap* menurut hasil wawancara dengan salah seorang informan mengatakan bahwa "mereka sebelum dan setelah adanya program *Coremap* telah berdampak pada semakin membaiknya pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah binaan *Coremap*". Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di lokasi penelitian yang menyatakan bahwa :

"Program *Coremap* telah mengubah kondisi ekonomi masyarakat dimana saat ini masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan standar kebutuhan yang cukup layak. Sebelum masuknya program *Coremap* di Kabupaten Buton kadang-kadang masyarakat sangat susah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena tidak ditunjang dengan penghasilan yang tidak menentu. Saat ini masyarakat telah memiliki adanya usaha rumah tangga yang setiap saat bisa mendatangkan keuntungan kendatipun masih dalam tahap awal sudah menunjukkan adanya kemajuan" (wawancara Januari 2009)

Pernyataan informan tersebut di atas ternyata ditanggapi secara berbeda dengan informan yang lainnya yang mengatakan:

"Bahwa program *Coremap* belum mampu memberikan kontribusi secara merata di wilayah binaanya, misalnya dalam memberikan bantuan modal usaha masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan modal sehingga terkesan bahwa *Coremap* itu belum cukup mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada seluruh masyarakat pesisir" (wawancara Januari 2009)

Pernyataan informan tersebut menggambarkan bahwa ternyata *Coremap* belum mampu memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat di wilayah binaanya. Hal ini sesungguhnya bisa dimaklumi dengan kondisi tersebut, artinya *Coremap* merupakan

suatu program pemberdayaan bagi masyarakat dimana pola kerjanya lebih mengarah pada penguatan kapasitas yang telah dimiliki masyarakat dan secara bertahap akan memberikan pelayanan pada seluruh kelompok-kelompok usaha yang telah dibentuk. Pembahasan mengenai gambaran efektifitas kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton seperti yang telah dideskripsikan tersebut di atas secara nyata memberikan petunjuk bahwa *Coremap* ternyata telah efektif untuk proses memberdayakan masyarakat pesisir.

Visi *Coremap* adalah menyelamatkan lingkungan alam kelautan terutama pelestarian terumbu karang dari ancaman kerusakan yang semakin tidak terkendali dan sekaligus memberikan penguatan pada masyarakat lokal yang bermukim disekitar wilayah pesisir untuk bisa hidup dari lingkungan alam kelautan, namun diharapkan dapat hidup dari lingkungan alam kelautan dengan penuh bijaksana dengan tetap mempertahankan kondisi terumbu karang yang menjadi penyangga dari kehidupan biota laut yang potensial bagi kebutuhan masyarakat sendiri.

Tabel 4.23 Tanggapan Responden tentang bagaimana Perbaikan perumahan penduduk setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	20	18
Meningkat	36	32
Kurang Meningkat	47	41
Tidak Meningkat	11	9
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa efektifitas implementasi program *Coramep* II Kabupaten Buton terutama yang berhubungan dengan item pertanyaan

bahwa kebijakan program *Coramep* sangat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk perbaikan perumahannya adalah sebesar 18% atau sebanyak 20 responden dan yang menyatakan bahwa dengan adanya program *Coremap* telah mampu meningkatkan perbaikan perumahan mereka adalah sebesar 32% atau sebanyak 36 responden. Sementara yang menyatakan bahwa kendatipun telah ada program *Coremap* masyarakat masih kurang mampu untuk meningkatkan perbaikan rumah mereka adalah sebesar 41% atau sebanyak 47 responden dan yang menyatakan tidak meningkat adalah sebesar 9% atau sebanyak 11 responden.

Jika dianalisis secara mendalam persentase atas jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa ternyata kebijakan *Coramep* di Kabupaten Buton telah mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam upaya perbaikan perumahan mereka. Kendatipun demikian masih separuhnya dari responden yang menyatakan bahwa *Coremap* masih kurang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha perbaikan tempat tinggal mereka. Hal ini dapat dimaklumi bahwa implementasi kebijakan *Coremap* Di kabupaten buton baru berjalan selama tiga tahun dan akan tetap berlangsung sampai berakhirnya proyek.

Besarnya persentase responden yang telah memiliki kemampuan dalam usaha perbaikan tempat tinggal mereka mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah binaan *Coremap* cenderung akan lebih sejahtera dalam memperjuangkan kehidupan mereka.

Tabel 4.24 Tanggapan Responden tentang tingkat perbaikan pendidikan masyarakat pesisir setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	23	20
Meningkat	55	48
Kurang Meningkat	33	29
Tidak Meningkat	3	3
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya program *Coremap* II di Kabupaten Buton telah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat pesisir. Hal ini tergambar dari jawaban responden sebesar 20% atau sebanyak 23 responden yang menyatakan bahwa sejak adanya *Coremap* peningkatan pendidikan sangat meningkat dan sebesar 48% atau sebanyak 55 responden menyatakan setelah adanya *Coremap* masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Hal ini terbukti bahwa setelah adanya kebijakan *Coremap* di Kabupaten Buton terutama di wilayah binaan *Coremap* mengalami peningkatan. Kendatipun sekitar 29% dan 3% yang menyatakan peningkatan pendidikan tidak mengalami peningkatan, namun secara nyata dapat dibuktikan bahwa tingginya presentase jawaban masyarakat yang menyatakan terjadinya peningkatan pendidikan ini bisa di kuatkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan seperti adanya bantuan beasiswa yang diberikan *Coremap* mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, S1 sampai pada jenjang Program Pascasarjana kepada masyarakat wilayah binaan *Coremap*. Selain itu diantara kegiatan-kegiatan *Coremap* ada pula kegiatan Cerdas-cermat tingkat SD,

SMP, SMA, lomba karya tulis ilmiah, lomba melukis yang kesemuannya itu dapat mendukung dan memacu minat belajar masyarakat. *Coremap* juga telah memasukan ilmu-ilmu tentang bagaimana merehabilitasi terumbu karang dalam muatan lokal untuk SD dan SMP.

Kemampuan masyarakat dalam upaya mendorong meningkatkan perbaikan bidang pendidikan akan lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang karena pendidikan adalah merupakan investasi yang sangat berharga untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang dalam memperjuangkan hidup yang lebih baik.

Tabel 4.25 Tanggapan Responden tentang tingkat Kerja Sama masyarakat pesisir setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	52	44
Meningkat	50	46
Kurang Meningkatkan	9	7
Tidak Meningkatkan	3	3
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Berdasarkan data tersebut diatas, menyatakan terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat dalam menjalankan program atau kegiatan yang di keluarkan oleh *Coremap* II Kabupaten Buton. Hal dapat dibuktikan dengan jawaban responden dimana 44% menyatakan sebagian besar masyarakat melakukan kerja sama dengan *Coremap*, yaitu sebesar 44% atau sebanyak 50 responden dan sebesar 46% menyatakan terjadi kerja sama antara pihak *Coremap* dengan responden, dan sebesar 7% kurang meningkat, sedangkan 3% menyatakan tidak ada peningkatan.

Tabel 4.26 Tanggapan Responden tentang keikutsertaan masyarakat pesisir setelah adanya program *Coremap*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat meningkat	41	36
Meningkat	61	54
Kurang Meningkatkan	11	9.6
Tidak Meningkatkan	1	0.4
Jumlah	114	100

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2009)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat wilayah *Coremap* turut berperan aktif dalam pelaksanaan program ini dibuktikan dengan presentase jawaban masyarakat yang mencapai 54% menyatakan sangat meningkat keikutsertaan masyarakat yaitu sebesar, 36% atau sebanyak 41 responden dan yang menyatakan meningkat adalah sebesar 51% atau sebanyak 61 responden.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas kebijakan Coremap II di Kabupaten Buton dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Coremap II* di Kabupaten Buton telah terlaksana dan berjalan dengan baik.

Gambaran Efektifitas kebijakan *Coremap II* di Kabupaten Buton adalah telah terlaksana dan berjalan dengan baik adalah keberhasilan pelaksanaan implementasi Program *Coremap II* di Kabupaten Buton dilakukan melalui sosialisasi kebijakan program *Coremap*, membangun kerja sama dengan masyarakat lokal, adanya dukungan masyarakat, adanya program pendidikan dan pelatihan pada masyarakat, lokakarya, memperkuat modal usaha produktif masyarakat dan keaktifan fasilitator *coremap* dalam memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat lokal sebagai sasaran program *Coremap*.

Implementasi kebijakan *Coremap II* Kabupaten Buton untuk menjaga kelestarian sumber daya terumbu karang adalah cukup efektif karena ditunjang oleh adanya strategi *Coremap* dalam proses menjalankan programnya. Efektifitas pelaksanaan kegiatan *Coremap* karena ditunjang oleh adanya dukungan pemerintah dan masyarakat binaan *Coremap*. Strategi yang dilakukan *Coremap* sehingga pelaksanaan kegiatannya cukup efektif adalah dilakukan dengan cara : (a) sosialisasi program keseluruh masyarakat binaannya (b) memberikan pembelajaran dan berbagai jenis pelatihan keterampilan kepada masyarakat binaannya (c) melakukan berbagai diskusi kelompok dengan masyarakat (d) melibatkan masyarakat dalam sosialisasi

program dan memberikan dukungan fasilitas dan memberikan bantuan dana melalui *Seet Fun dan Block Grand, sehingga masyarakat mendukung kegiatan-kegiatan Coremap.*

B. Saran

Dalam pelaksanaan program *Coremap* walaupun secara keseluruhan dianggap berhasil dalam pelaksanaannya dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir namun tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, olehnya itu saya sebagai peneliti menyarankan hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah peran serta pemerintah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring suatu kegiatan yang akan di terapkan di daerahnya.

Keberhasilan program *Coremap* sangat ditentukan oleh pengawasan yang terarah pada pelaksanaan semua kegiatannya di lapangan. Karena tanpa pengawasan yang insentif masyarakat akan acuh tak acuh dengan segala yang telah mereka terima. Disamping itu dalam pelaksanaan setiap program, kesadaran masyarakat sangat memegang peranan penting karena sebaik apapun pelaksanaan program itu tanpa ada kesadaran masyarakat dalam proses pelaksanaannya program tersebut tidak akan tercapai sesuai tujuannya.

Peran SETO, CF dan MD (fasilitator lapangan) sangat memegang peranan penting karena mereka merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang terjun langsung ke lapangan. Kurang intensifnya mereka ke lokasi program berpengaruh pada informasi dan pelaksanaan program yang tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G.N, (1992). *Metode penelitian sosial, pengertian dan pemakaian praktis*. Jakarta: Gramedia.
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah(2008) *Kabupaten Buton dalam angka tahun 2007*. Buton: Badan Pusat Statistik.
- Carter, W. D. (2003). Protected areas in marine resource management another look at the economics and research issues. Diambil 8 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://esm.ucsb.edu>.
- Coremap II. (2006). *Pedoman umum pengelolaan berbasis masyarakat corel reef rehabilitation and management program (Coremap)*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Dayanto, (1995). *Masalah pencemaran*. Bandung: Tarnisito.
- Dahuri et.al.(2001). Integratet coastal management in A. decentralized Indonesia. Diambil 8 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://www.crc.uri.edu>.
- Daniel, J.(1994) *Multiple perspectives of entrepreneurship: Text, Readings, and cases*. South-Western Publishing.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding public policy*, Newjersey Prentice Hall. Inc.
- Effendy, O. (2000) *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gamal, M.(2006). Model dinamika sosial ekonomi islami; Solusi Pembangunan Kesejahteraan Berkesinambungan dan Berkeadilan. Diambil 10 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://www.group.yahoo.com>.
- Gibson, et.al. (1985). Organisasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hanafi, A. (2003) *Memasyarakatkan ide-ide baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Handayaniingrat (1984) *Administrasi pemerintah dalam pembangunan nasional* Jakarta : Gunung Agung.
- Ikawati, Y. (2001). *Terumbu karang di Indonesia*. Jakarta: Magiptek.

- Islamy, M.I. (1984). *Prinsip-Prinsip perumausan kebijakan negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kasim, A. (1993). *Pengukuran efektifitas dalam organisasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kismartini, dkk. (2005) *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Koentjaraningrat. (1981) *Aneka warna manusia dan kebudayaan indonesia dalam pembangunan*. Jakarta: Jembatan.
- Koontz, H. (1989). *Intisari manajemen (Essentials Of Management)*. Jakarta: Bina Aksara Jakarta.
- Nagib, L. dkk. (2008). *Kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi Coremap II kasus Kabupaten Buton*. Jakarta: Lipi.
- Nasir, M. (1999) *Metode penelitian*. Jakarta : Ghalia.
- Nawawi, H. (1983). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nikijuluw, P. H.V. (2002). Small scale fisheries managemen Indonesia. Diambil 8 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://www.tistr.dr.th>.
- Moleong, J. L. (1994). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peter, D. (1985) *Innovation and entrepreneurship. practice and principles*. William Heinemann Diambil 11 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://www.babson.edu>.
- Perda Nomor 10 Tahun 2007. (2007). *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Buton*. Pemerintah Kabupaten Buton.
- Purwanto, A. J. (2006). *Inovasi dan perubahan organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pomeroy & Williams (1994). *Fisheries Co-Management and Small-Scale Fisheries Apolicy Brief*. Diambil 8 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://www.dlc.dlib.indiana.edu>.
- Reksopoetranto, S.(1992). *Manajemen proyek pembangunan*. Jakarta: FE-UI.

- Riduawan. (2004). *Metode dan teknik menyusun tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rogert, E. M, and Shoemaker F.Floyd. (1971). *Communication of inovation*, London: Free Press Macmilan Publishing Co. In.
- Rudianto, (2007). *Keindahan yang belum terjaga*. Jakarta: PMO/NCU Coremap II.
- Singarimbun, Masri, S. & Sofian, E. (1989). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Shoemaker , F. (1971). *Communication of Inovations* .Second Edition A Devision Of Macmillan Publishing Co inc New York.
- Soegiarto (2002). Indonesian journal of coustal and marine resources. *Jurnal Pesisir dan Lautan*, Vol.4,3. Diambil 15 Juni 2009, dari situs Word Wide Web <http://crc.uri.edu>.
- Soemarwoto, O. (1997). *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Suharto, E. (2005), *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Jakarta: Refika Aditama.
- Sunggono & Bambang. (1994). *Hukum dan kebijakan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supardi, I. (1994). *Lingkungan hidup kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. S. (1995) *Sosiologi pembangunan*. Bandung: Bina Cipta.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Usman, R. (1993). *Pokok-pokok hukum lingkungan nasional*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Van Meter, D. & Van Horn, C. E. (1978). *The policy implementation proses*. Beverry Hill: A Conceptual Framework in Administration and Society.
- Wahab, S. A. (1990). *Pengantar analisis kebijaksanaan negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Wahab, S. A. (1990). *Analisa kebijakan dan formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara Pers.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Teori & proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1

DAFTAR USULAN KEGIATAN BLOCK GRAND TAHUN 2007
DAFTAR KEGIATAN BLOCK GRAND

NO	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN	DANA	KET
1	Mawasangka	Terapung	Pembangunan Pra Sarana Fisik Desa (Pembuatan Bak Reservoir)	50.000.000	
		Kancebungi	Pembangunan Pra Sarana Fisik Desa (Pembuatan Talut Pantai)	50.000.000	
		Gumanano	Pembuatan Talut Tahap I	50.000.000	
		Wakambangura	Pembuatan Talut Tahap I	50.000.000	
2	Lasalimu Selatan	Lasalimu	Pembuatan Drainase	50.000.000	
		Umalaoe	Pembangunan Balai Pertemuan Desa dan Rehabilitasi DPL	50.000.000	
3	Batu Atas	Wacuala	Pembuatan Bak Penampungan Air dan Pembuatan Tapal Batas DPL	50.000.000	
		Tolando Jaya	Pembuatan Tambatan Desa	50.000.000	
		Batu Atas Barat	Pembuatan Tambatan Desa	50.000.000	
4	Siompu	Wakinamboro	Pembuatan Jalan Melayan	50.000.000	
		Kaimbulawa	Pembuatan Jalan	50.000.000	
		Tongali	Pembangunan Pasar Ikan	50.000.000	
5	Talaga Raya	Kokoe	Pembangunan Perumahan Guru	50.000.000	
		Talaga Besar	Pembangunan Jalan Usaha Tani	50.000.000	
		Talaga II	Pembangunan Polindes	50.000.000	
		Talaga I	Pemecah Ombak	50.000.000	
6	Siontapina	Kaimbulawa	Pembuatan Jalan Lingkungan	50.000.000	
7	Wabula	Wasuamba	Pembuatan Pelindung Pantai dan Pemecah Gelombang	50.000.000	
		Koholimombono	Pembangunan Sanggar Budaya/ Kabaria dan Fasilitasnya	50.000.000	
		Wabula	Rehabilitasi Galangpa/ Sanggar Seni	50.000.000	
8	Kadatua	Kapoa	Pembangunan MCK	50.000.000	
		Uwemaasi	Rehabilitasi Balai Desa	50.000.000	
		Waconu	Pembangunan Gedung Posyandu	50.000.000	
		Kaofe	Rehab Pelindung Perahu/ Pemecah Ombak	50.000.000	

DAFTAR USULAN KEGIATAN BLOCK GRAND TAHUN 2008

NO	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN	DANA	KET
1	Mawasangka	Gumanano	Pembuatan Talud Pantai	50.000.000	
		Wakambangura	Pembuatan Talud lanjutan	50.000.000	
2	Lasalimu Selatan	Umalaoge	Pembangunan Balai Pertemuan Desa dan Rehabilitasi DPL	100.000.000	
3	Batu Atas	Wacuala	Pembuatan Bak Penampungan Air dan Pembuatan Tapal Batas DPL	50.000.000	
		Batu Atas Timur	Pembangunan jalan Desa	100.000.000	
4	Siompu	Biwinapada	Rehab DPL, Peralatan pondok, Pemb Bak air	50.000.000	
5	Talaga Raya	Kokoe	Balai Pertemuan	50.000.000	
6	Siontapina	Kumbewaha	Pembuatan Talud lanjutan	50.000.000	
7	Wabula	Wasampela	Pembuatan Jalan Setapak, Pelindung Pantai	100.000.000	
8	Kadetua	Kapoa	Pembangunan Bina Kel Balita	50.000.000	
		Uwemaasi	Pembangunan Posyandu	50.000.000	
		Kaofe	Pembangunan Posyandu	50.000.000	
9	Mawasangka Timur	Lasori	Pembuatan Jalan Pemukiman Nelayan	100.000.000	
		Inulu	Pembuatan jalan lingkungan (rabat Baton)	100.000.000	
		Bungi	Pembuatan Jalan Air Bersih	50.000.000	
10	Mawasangka Tengah	La Korua	Tempat pelelangan ikan	50.000.000	
		Waturumbe bata	pembuatan jalan usaha tani	50.000.000	
		Gundu-gundu	pembuatan jalan air bersih	50.000.000	
11	sampilawa	Tira	Rehab balai pertemuan dan Pembuatan talud	100.000.000	
		Bahan	Pembangunan gedung TK	50.000.000	
		Cerak Makmur	Rehab DPL dan Gedung serbaguna	50.000.000	
12	Batauga	majapahit	pembangunan Gedung serbaguna dan tanda batas DPL	50.000.000	
		Lampanairi	rabat Beton, Rehab Polindes dan Tanda batas DPL	100.000.000	
		Bola	Pembangunan jalan lingkungan, tanda batas DPL dan Rehab Pustu	100.000.000	
13	siompu Barat	La Iole	perbaikan jalan desa	50.000.000	
		Mbanua	Pembangunan Balai desa	50.000.000	
		Molona	Tempat penjualan ikan	50.000.000	

Lampiran 2

Penyaluran dana Seed fund dan AIG di 14 kecamatan wilayah *Coremap*:

Daftar Penerima Seed Fund

No	Kecamatan	Desa	Penerimaan (Rp.)			Total
			2007	2008	Tambahan 2009	
1	Siompu Barat	Lalole	25.000.000	25.000.000		50.000.000
2		Mbanua	25.000.000	25.000.000		50.000.000
3		Molona	50.000.000			50.000.000
4	Siompu	Tongali	25.000.000	25.000.000		50.000.000
5		Wakinamboro	50.000.000			50.000.000
6		Biwinapada	50.000.000			50.000.000
7		Kaimbulawa	25.000.000	25.000.000		50.000.000
8	Wabula	Wabula	50.000.000			50.000.000
9		Wasampela	25.000.000	25.000.000		50.000.000
10		Wasuamba	50.000.000			50.000.000
11		Koholimombono	25.000.000	25.000.000		50.000.000
12	Kadutua	Uwemasi	50.000.000			50.000.000
13		Kaole	25.000.000	25.000.000		50.000.000
14		Wacnu	25.000.000	25.000.000		50.000.000
15		Kapoa	25.000.000	25.000.000		50.000.000
16	Batauga	Bola	50.000.000			50.000.000
17		Lampainari	50.000.000			50.000.000
18		Majapahit	25.000.000	25.000.000		50.000.000
19	Mawasangka	Terapung	50.000.000			50.000.000
20		Wakambangura	25.000.000	25.000.000		50.000.000
21		Kancebung	50.000.000			50.000.000
22		Gumanano	25.000.000	25.000.000		50.000.000
23	Mawasangka Timur	Lasori	25.000.000	25.000.000		50.000.000
24		Inulu	25.000.000	25.000.000		50.000.000
25		Bungi	50.000.000			50.000.000
26	Mawasangka Tengah	Lakonia	50.000.000			50.000.000
27		Watunembe Bata	25.000.000	25.000.000		50.000.000
28		Gundu - Gundu	25.000.000	25.000.000		50.000.000
29	Talaga Raya	Kelurahan Talaga I	25.000.000	25.000.000		50.000.000
30		Talaga Besar	50.000.000			50.000.000
31		Talaga II	25.000.000	25.000.000		50.000.000
32		Kokoe	50.000.000			50.000.000
33	Lasalimu Selatan	Lasalimu	25.000.000	25.000.000		50.000.000
34		Umalaoge	50.000.000			50.000.000
35	Siontapina	Kumbewaha	25.000.000	25.000.000		50.000.000
36		Sampuabako	50.000.000			50.000.000
37	Sampolawa	Gerak Makmur	25.000.000	25.000.000		50.000.000
38		Bahari	50.000.000			50.000.000
39		Tira	25.000.000	25.000.000		50.000.000
40	Batuatas	Batuatas Timur	50.000.000			50.000.000
41		Batuatas Barat	25.000.000	25.000.000		50.000.000
42		Wacuala	25.000.000	25.000.000		50.000.000
43		Tolando Jaya	50.000.000			50.000.000
		Total	1.550.000.000	600.000.000	-	2.150.000.000

Matriks Rekapitulasi Alternative Income Generating (AIG) Coremap-II Kab. Buton

No.	Judul Usulan Kegiatan	Lokasi Kecamatan	Biaya Diajukan	Lembaga Pengusul	Penanggung Jawab
1.	Pengembangan Usaha Pengelolaan Perikanan Tangkap	Batuatas	60.000.000,-	Kelompok Mitra Bahari	Gunawan
2.	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Tangkap	Sampolawa	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Laode Hajia
3.	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Tangkap	Lasalimu	50.000.000,-	Kelompok Pengumpul	H. Radin
4.	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Tangkap	Siontapina	40.000.000,-	Kelompok Pengumpul	M. Hasanatun
5.	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Tangkap	Wabula	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Anwar Tiha
6.	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Tangkap	Siompu	40.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Yono Maryono
7.	Usaha Pemanfaatan Ikan Karang Desa Talaga Besar	Talaga Raya	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Yusuf
8.	Usaha Pemanfaatan Ikan Karang Kelurahan Talaga I	Talaga Raya	37.500.000,-	Kelompok Nelayan	Darwis Laudara
9.	Usaha Pemberdayaan Papalele dalam Meningkatkan Nilai Jual dan Pendapatan Nelayan di Desa Kapoa	Kadatua	30.400.000,-	Kelompok Papalele	Mulir

10.	Bantuan Base Camp Penampungan Ikan Teri	Mawasangka	30.000.000,-	Kelompok Penampung	Baharuddin Gani
11.	Pengembangan Usaha Produktif Pengumpul Tuna Desa Sampuabalo	Siontapina	60.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Waode Ziana
12.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Mawasangka Tengah	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	La Abudu
13.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Batauga	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	La Uga
14.	Pengembangan Usaha Sebagai Pengumpul Rumput Laut	Batauga	35.000.000,-	Koperasi Serba Usaha Bina Rano Ekpress	La Nusia
15.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Mawasangka Timur	58.000.000,-	Kelompok Pengumpul	La Samuni
16.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Siompu Barat	40.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Masrin Mas'ud
17.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Mawasangka	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	La Ido
18.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Talaga Raya	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	Abidin
19.	Pengembangan Usaha Pengumpul Rumput Laut	Talaga Raya	30.000.000,-	Kelompok Pengumpul	H. Abdul Muin
20.	Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak	Mawasangka Timur	41.585.000,-	Koperasi Lamena	Basri, SE.

	(BBM)				
21.	Pengembangan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)	Lasalimu	60.000.000,-	CV. Umega Arju	Mustaim
21.	Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Kecamatan Wabula	Wabula	100.000.000, -	LAPPERA	Anwar Tiha
Total dana yang diajukan (Rp)			922.485.000, -	(Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	
			892.485.000, -	(Delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Prepared by : CBMA PMC Coremap-II Buton

KUESIONER PENELITIAN

Pentunjuk Pengisian Angket

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan
2. Berilah jawaban **Ya** atau **Tidak** pada alternative jawaban yang telah disediakan

3. Karakteristik Responden

1. Nama
1. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Tingkat Pendidikan

Pertanyaan untuk Menjawab Implementasi Kebijakan Coremap

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	<i>Menurut tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Coremap:</i> 1. <i>Coremap</i> mensosialisasikan kebijakan programnya ke seluruh masyarakat 2. <i>Coremap</i> mengajak bekerja sama dengan masyarakat dalam sosialisasi programnya 3. <i>Coremap</i> tidak membedakan masyarakat dalam proses sosialisasi programnya 4. <i>Coremap</i> mensosialisasikan terlebih dahulu pelaksanaan program yang akan dilakukannya <i>Coremap</i> tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat dalam sosialisasi kebijakan programnya		

2	<i>Menurut tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) apakah Program Coremap pernah melakukan hal-hal berikut ini:</i> 1. Penyusunan PRA 2. Penyusunan RPSTK 3. Pembutan DPL 4. Penyusunan Perdes 5. Pelatihan Selam Dasar dan SAR 6. Pelatihan Pemantauan terumbu Karang dan ikan 7. Pelatihan BME & Ekologi 8. Pelatihan pegelolaan perikanan berkelanjutan 9. Pelatihan daerah pweriindungan laut 10. Pelatihan tekhnis dan manajemen usaha perikanan 11. Pelatihan pengembangan usaha perikanan 12. Pelatihan infestigasi penangkapan ikan tidak ramah lingkungan 13. Lokakarya strategi penyadaran masyarakat 13. Pelatihan wanita nelayan		
3	<i>Menurut tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Coremap</i> 1. Merespon positif pelaksanaan Kebijakan <i>Coremap</i> 2. Pelaksanaan kebijakan <i>Coremap</i> bekerja sama dengan masyarakat 3. Ikut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan <i>Coremap</i> 4. Berperan dalam pengawasan terumbu karang		
4	<i>Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Coremap</i> 1. Merespon positif pelaksanaan Kebijakan <i>Coremap</i>		

	2. Pelaksanaan kebijakan <i>Coremap</i> bekerja sama dengan masyarakat 3. Ikut serta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan <i>Coremap</i> 4. Berperan dalam pengawasan terumbu karang		
5	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Kebijakan <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Pembedayaan Masyarakat 1. <i>Coremap</i> aktif dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat 2. Memberdayakan masyarakat pesisir 3. Menanamkan kesadaran masyarakat pesisir untuk berpartisipasi dalam pelestarian terumbu karang 4. Usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam mengelola potensi wilayah pesisir 5. Kampanye penyelamatan terumbu karang dari kerusakannya		
6	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Program <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Kampanye Kesadaran Lingkungan 1. Melaut dengan menggunakan bahan kimia beracun perbuatan melanggar hukum 2. Mengambil batu dan pasir laut secara berlebihan melanggar hukum 1. Menebang hutan bakau adalah suatu pelanggaran hukum 2. Membuang sampah di laut merupakan pelanggaran hukum		
7	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Implementasi Pelaksanaan Program <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Administrasi dan Organisasi 1. Mulai tahu mengelola administrasi keuangan 2. Mulai tahu membentuk kelompok usaha 3. Mulai faham adanya dinamika kelompok 4. Mulai tahu membuat dan mengusulkan proposal anggaran		

	Pertanyaan untuk Menjawab Efektifitas Implementasi Kebijakan Coremap		
8	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Sosialisasi dan Pelatihan 1. Sosialisasi program <i>Coremap</i> dapat mengetahui secara pasti tujuan dan fungsi <i>Coremap</i> 2. Pelatihan program <i>Coremap</i> dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir 3. Diskusi kelompok dengan <i>Coremap</i> dapat memberikan pemahaman bahwa terumbu karang harus dilestarikan oleh masyarakat pesisir sendiri		
9	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i> dalam Meningkatkan Keterampilan Administrasi dan Keuangan 1. Efektif sebagai pembelajaran mengelola administrasi keuangan 2. Efektif sebagai ajang latihan membentuk kelompok usaha 3. Efektif dalam memahami dinamika kelompok dalam usaha bersama 4. Efektif untuk ajang latihan membuat dan mengusulkan proposal anggaran		
10	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat 1. Mensejahterakan masyarakat 2. Memperkuat modal usaha masyarakat 3. Meningkatkan produksi berkelanjutan		
11	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i> dengan Sikap Masyarakat pada Lingkungan Pesisir 1. Mulai sadar mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang 2. Mulai meninggalkan kebiasaan menggunakan bahan		

	kimia beracun dalam kegiatan melaut 3. Mulai mau berpartisipasi dalam melestarikan terumbu karang		
12	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas Kebijakan <i>Coremap</i> dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat 1. Masyarakat Pesisir karena adanya <i>Coremap</i> 2. Puas dengan kegiatan yang dilakukan <i>Coremap</i>		
13	Tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/(i) tentang Efektifitas Pelaksanaan Program <i>Coremap</i> yang berhubungan dengan Pendapatan Masyarakat 1. Meningkatkan produksi nelayan 2. Menguntungkan masyarakat pesisir 3. Pendapatan masyarakat biasa-biasa saja 4. Membuat pendapat masyarakat tidak menentu 5. Hanya merugikan masyarakat		

Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh setelah adanya Pelaksanaan Kebijakan Coremap Di Kabupaten Buton

No	Item Pertanyaan	SM	M	KM	TM
1	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) hasil tangkapan ikan nelayan setelah adanya pelaksanaan Kebijakan <i>Coremap</i>				
2	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) hasil tangkapan ikan setelah menerapkan proses penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan memelihara terumbu karang				
3	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) hasil tangkapan ikan setelah menerapkan proses penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan memelihara terumbu karang				

4	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) pengetahuan pengelolaan wilayah pesisir setelah adanya program Coremap				
5	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) modal usaha masyarakat pesisir setelah adanya program <i>Coremap</i>				
6	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) pengetahuan pengelolaan wilayah pesisir setelah adanya program Coremap				
7	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat pemenuhan kebutuhan sandang-pangan masyarakat setelah adanya program <i>Coremap</i>				
8	Tanggapan Responden tentang tingkat pemenuhan kebutuhan sandang-pangan masyarakat setelah adanya program <i>Coremap</i>				
9	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat pemenuhan kebutuhan sandang-pangan masyarakat setelah adanya program <i>Coremap</i>				
10	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) bagaimana Perbaikan perumahan penduduk setelah adanya program <i>Coremap</i>				
11	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) bagaimana Perbaikan perumahan penduduk setelah adanya program <i>Coremap</i>				
12	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat perbaikan pendidikan masyarakat pesisir setelah adanya program <i>Coremap</i>				
13	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat perbaikan pendidikan masyarakat pesisir setelah adanya program <i>Coremap</i>				

14	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) tingkat Kerja Sama masyarakat pesisir setelah adanya program <i>Coremap</i>				
15	Menurut Bpk/ibu Sdr (i) keikutsertaan masyarakat pesisir setelah adanya program <i>Coremap</i>				

Ket:

SM = Sangat Meningkatkan

M= Meningkatkan

KM= Kurang meningkatkan

TM = Tidak Meningkatkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Pertanyaan / wawancara kepada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengelola Program Coremap II setempat.

1. Bagaimana penerimaan masyarakat bapak terhadap masuknya program Coremap II ini?
2. Apakah menurut penilaian bapak dengan adanya Coremap ini terjadi peningkatan pendapatan masyarakat setempat?
3. Apakah terjadi perubahan perilaku masyarakat setelah adanya program ini?
4. Masalah atau kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini?
5. Apakah program Coremap II ini perlu di teruskan atau tidak? Alasannya

UNIVERSITAS TERBUKA